

**USAHA PENINGKATAN POTENSI DESA DI DESA
BORI' PARINDING KECAMATAN SESEAN
KABUPATEN DATI II TANA TORAJA**

Oleh :

AGUSTINUS ANTHON RAMBA'



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

1990

USAHA PENINGKATAN POTENSI DESA DI DESA BORI' PARINDING
KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DATI II TANA TORAJA



OLEH:

AGUSTINUS ANTHON RAMBA'

84 08 173

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	1-05-90
Asal dari	FISIPOP
Jumlahnya	1 (satu) eks.
Harga	Gratis
No. Inventaris	90 05 1430
No. Klas	

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Jurusan
Ilmu Pemerintahan
Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

1990

HALAMAN PENGESAHAN

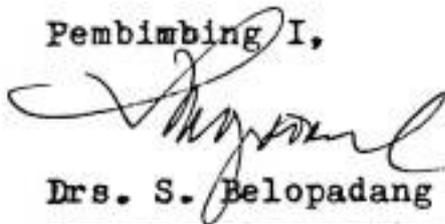
Judul Skripsi : USAHA PENINGKATAN POTENSI DESA
DI DESA BORI'PARINDING KECAMATAN
SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II TANA TORAJA

Nama Mahasiswa : AGUSTINUS ANTHON RAMBA'

Nomor Pokok : 84 08 173

Menyetujui :

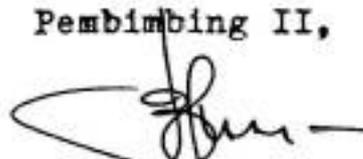
Pembimbing I,



Drs. S. Belopadang

NIP : 130 162 840

Pembimbing II,

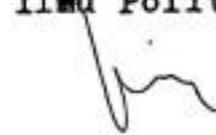


Drs. A. Syamsuddin, MS.

NIP : 130 785 086

Memgetahui :

Ketua Jurusan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik



Drs. Mappa Nasrun, MA.

NIP : 130 327 024



Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



H. Sadly AD., MPA

NIP : 130 264 141

Tanggal Lulus :

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Untuk memenuhi sebahagian syarat-syarat guna memperoleh sarjana dalam Program Studi

Ujung Pandang,1990

Pada hariRabu..... Tanggal ...11.April.....1990

TIM EVALUASI

- K e t u a : Drs. H. Sadly., MPA. (.....)
- Sekretaris : Drs. M. Jafar (.....)
- Anggota 1. : Drs. Abd. Rahman Kotta, SU. (.....)
2. : Drs. S. Belopadang (.....)
3. : Drs. A. Syamsuddin, MS. (.....)
4. : (.....)

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena berkat bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "USAHA PENINGKATAN POTENSI DESA DI DESA BORI' PARINDING KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA".

Penulis menyadari di dalam karya ini terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan baik ditinjau dari materi yang disajikan maupun dari segi teknik penulisannya. Kelemahan dan kekurangan ini pada dasarnya disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Dalam hubungan ini maka penulis berlapang dada menerima kritik dan saran guna penyempurnaan karya ilmiah ini. Sehingga hasil dari pada buah pikiran ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya bagi pemerintah desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Dalam proses penyelesaian studi sampai pada akhir penulisan skripsi ini, maka sudah banyak pengorbanan waktu, tenaga dan biaya serta bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Olehnya itu melalui kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA , sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. Sadly AD., MPA, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. Ibu Dra. Hasyah Haneng, MPA, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin .
4. Bapak Drs. Mappa Nasrun, MA, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Drs. S. Belopadang dan Bapak Drs. A. Syamsuddin, MS yang membimbing dan menuntun penulis dari awal sampai penyelesaian skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam pendidikan.
7. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja beserta Stafnya yang telah memberikan keluasaan dalam rangka pengumpulan data guna penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Kepala Kecamatan Sesean beserta Stafnya yang telah berkenan memberikan informasi sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Kepala Desa Bori' Parinding beserta Stafnya dan para responden lainnya yang telah memberikan keterangan - keterangan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
10. Ayah Bunda tercinta, kakak-kakak dan adik-adik tersayang beserta segenap keluarga atas doa restu, pengorbanan dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan - rekan pengurus/anggota kelompok studi " LESTARI "

yang telah banyak memberikan dukungan dan saran-saran kepada penulis.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang membalas budi baik Bapak/Ibu, Saudara-saudari dengan limpahan rahmatNya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dan senantiasa diberkati dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Amin.

Pemulis,

I N T I S A R I

Pengertian potensi desa sebenarnya adalah yang meliputi sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi baik yang sudah terwujud maupun yang belum terwujud yang dapat diharapkan pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa. Dimana potensi-potensi inilah yang harus digali dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan sebagai salah satu sumber dana dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan.

Penelitian ini tentang "Usaha Peningkatan Potensi Desa di Desa Bori' Parinding Kecamatan Seseam Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja", adalah bertujuan : Untuk mengetahui bagaimana usaha Kepala Desa bersama aparatnya dalam pengembangan potensi desa yang dimiliki, Untuk mengetahui sampai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam penggarapan dan pengelolaan potensi alam yang tersedia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini memakai tipe penelitian deskriptif yaitu menggambarkan mengenai pengembangan potensi desa dengan mekanisme pengelolaannya serta masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaannya. Sedangkan dasar penelitian yang dipakai adalah studi kasus yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi.

Sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk berhasilnya usaha pembangunan di desa Bori' Parinding yang seka-

rang ini giat dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, maka potensi-potensi yang dimilikinya telah mendapat perhatian untuk dikembangkan dalam bentuk penggarapan dan pengelolaan. Apalagi potensi yang ada di desa ini yang berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup besar memberikan andil didalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memajukan pembangunan desa. Kepala Desa di desa ini juga sudah memainkan peranannya dalam proses kegiatan pembangunan di wilayahnya, sehingga akibatnya menumbuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya gotong royong untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat terjadi oleh karena Kepala Desa bersama aparatnya berusaha menempatkan diri sebagai pemimpin masyarakat yang disenangi dan ditaati. Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Bori' Parinding adalah besar. Walaupun tidak semua anggota masyarakat turut serta dalam merencanakan proyek-proyek pembangunan Desa, tetapi dengan hadirnya LKMD dimana tokoh-tokoh masyarakat duduk dalam lembaga ini untuk membantu Kepala Desa didalam membuat suatu perencanaan, maka secara teknis hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat telah ikut berperan dalam perencanaan pembangunan desa mengingat LKMD adalah merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

DAFTAR ISI SKRIPSI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Usaha	12
B. Pengertian Pemerintah Desa	12
C. Pengertian Potensi Desa	16
BAB III. GAMBARAN KHUSUS LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis Desa Bori'Parinding..	24
A.1. Keadaan Alam	24
A.2. Sejarah Singkat Desa Bori' Parin- ding	26
B. Potensi Desa Bori' Parinding	
B.1. Potensi Sosial	31

- B.2. Potensi Ekonomi 50
- B.3. Potensi Perhubungan 60
- B.4. Potensi Pariwisata 61

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Usaha Peningkatan Potensi Desa di Desa Bori'Parinding 64
 - A.1. Faktor Kepemimpinan 64
 - A.2. Faktor Kelembagaan 70
 - A.3. Faktor Sumber Daya 74
 - A.4. Faktor Teknologi 76
- B. Beberapa Hambatan Yang Ditemui Dalam Usaha Peningkatan Potensi Desa di Desa Bori'Parinding 80
- C. Hasil-Hasil Pembangunan Yang Dicapai di Desa Bori'Parinding 85

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN-SARAN

- A. Simpulan 89
- B. Saran-saran 90

DAFTAR KUTIPAN 92

DAFTAR PUSTAKA 94

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Keadaan Penggunaan Tanah di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	25
2.	Distribusi Penduduk Dalam Setiap Dusun di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	32
3.	Jumlah Penduduk Desa Bori' Parinding Diperinci Menurut Luas Wilayah dan Kepadatannya, Tahun 1990	33
4.	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Umur di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	36
5.	Keadaan Penduduk Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Diperinci Menurut Lapangan Kerja, Tahun 1990..	38
6.	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	40
7.	Penyebaran Prasarana Pendidikan Dalam Setiap Dusun di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	41
8.	Jumlah Penduduk Yang Memanfaatkan Sarana Pengobatan di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	44
9.	Komposisi Penduduk Desa Bori' Parinding Diperinci Menurut Dusun, Agama dan Jenis Kelamin, Tahun 1990	45
10.	Keadaan Produksi Pertanian di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	52
11.	Jumlah Tanaman Perkebunan di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	53

Nomor		Halaman
12.	Jumlah Hewan Ternak di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	58
13.	Sumbangan Hewan/Daging oleh Penduduk di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Dilihat Dari Tahun 1986 - 1989	73
14.	Hambatan-Hambatan Yang Ditemui Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1990	81
15.	Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, Tahun 1984 - 1990	87-88

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bori' Parinding	95
2. Peta Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Dati II Tana Toraja	96

BAB I
P E N D A H U L U A N



A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Desa adalah merupakan bahagian yang integral dari Pembangunan Nasional, sebagai usaha bersama dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan bersama pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan desa secara menyeluruh dan terpadu, tentunya ada imbalan kewajiban yang serasi antara Pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahannya, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swadaya, swakarsa dan gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Sadar bahwa beribu-ribu desa menghampar di persada Nusantara ini, maka hampir mustahil bagi pemerintah untuk menangani semua pekerjaan tersebut secara sepihak dan menyeluruh. Sementara kita pun menyadari bahwa tujuan Pembangunan Nasional tidak lain seperti apa yang dinyatakan dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 tentang GBHN yaitu:

"Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suatu perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan damai". 1)

Rumusan tersebut di atas memberi pengertian bahwa Pembangunan Nasional sepenuhnya diarahkan kepada tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan demikian pembang-

uman tersebut pada hakekatnya berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pembangunan Desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa Pembangunan Desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusia dan potensi alamnya.

Potensi Desa meliputi sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusia baik yang sudah terwujud maupun yang belum terwujud dan yang dapat diharapkan pemanfaatannya bagi **ke-**
langkaungan dan perkembangan suatu desa. Potensi-potensi inilah sebenarnya yang harus digali dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan. Salah satu jalan yang harus ditempuh yaitu dengan penggalian, pengusahaan serta pemanfaatan potensi desa yang benar-benar terlihat bahwa mempunyai rangkaian yang erat dengan Perencanaan Pembangunan Desa dari desa yang bersangkutan. Seperti yang dikemukakan oleh Drs. I. Nyoman Beratha bahwa karena dengan Perencanaan Pembangunan Desa yang terarah maka diharapkan:

- "a. Akan menjamin kesinambungan tata lingkup desa dan stabilitas desa. Jadi dengan perencanaan, penggalian, serta pemanfaatan potensi desa yang terarah maka benar-benar akan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat desa dan bukan untuk kepentingan perseorangan maupun golongan
- b. Akan dapat pula dihindari perusakan-perusakan lingkungan (seperti hutan) oleh mereka yang tidak bertanggung jawab". 2)

Pemberian otonomi kepada desa, berarti pemberian kewe-

nangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai konsekwensinya maka pemerintah desa harus memiliki kemampuan di bidang keuangan, oleh karena itu bagaimana pun juga prasyarat tersebut merupakan energik yang justeru inherent dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, khususnya untuk pembangunan.

Menggarap potensi desa melalui penggalan seoptimal mungkin, tentu memerlukan suatu perencanaan yang baik serta didukung oleh perangkat-perangkat pemerintahan yang memadai baik yang ditinjau dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Dengan tersedianya perangkat pemerintahan yang memadai akan dapat melahirkan suatu mekanisme pengelolaan potensi desa dengan baik yang pada gilirannya menambah keuangan desa untuk dipakai dalam melaksanakan pembangunan.

Walaupun potensi alam telah tersedia pada suatu desa, namun masalahnya adalah bagaimana mengolah potensi alam tersebut. Oleh sebab itu pemerintah desa harus mampu menggerakkan masyarakatnya untuk menggarap potensi alam sebagai sumber pendapatan dalam pemenuhan kebutuhannya dan juga merupakan modal dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Desa boleh dikata pada umumnya hanya mengharapkan dana yang datangnya dari atas tanpa memperhatikan potensi desanya yang bisa dikembangkan, yang tentunya mempunyai peranan besar dalam mengisi keuangan desa untuk dijadikan dana dalam pembiayaan pembangunan.

Bertolak dari uraian di atas, maka oleh penulis mengangkat judul yang dianggap relevan yaitu:

"USAHA PENINGKATAN POTENSI DESA DI DESA BORI'PARINDING
KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA
TORAJA".

Selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa alasan pemilihan judul di atas yaitu:

1. Pembangunan Desa sering mandek karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan. Untuk menutupi kekurangan dana pembangunan itu, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk menggali dan mengolah seoptimal mungkin potensi desa yang dimiliki.
2. Dengan melalui penggarapan dan pengelolaan potensi alam yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka dengan sendirinya pendapatan masyarakat dapat meningkat.
3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, maka pemerintah desa perlu mengadakan pendekatan atau motivasi yang mampu menggerakkan masyarakat, sehingga secara keseluruhan beranggapan bahwa desa itu milik mereka dan dengan demikian mereka giat memberikan peran sertanya terhadap pembangunan desa.

B. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya sampai akhir Pelita IV telah banyak kegiatan pembangunan diadakan dalam rangka Pembangunan Desa yang hasil-hasilnya telah dirasakan. Namun demikian masih banyak permasalahan yang belum terpecahkan. Hal ini disebabkan karena masalah yang timbul dalam masyarakat sangat kompleks, utamanya dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Disamping itu pembangunan

desa sering mandek karena kurangnya dana dalam pembiayaan pembangunan serta masih banyak Pemerintah Desa yang hanya selalu mengharapkan dana yang datangnya dari atas. Dan juga biasanya Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya selalu pasif, tidak memiliki gaya kepemimpinan yang bisa membangkitkan semangat masyarakatnya, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus membantu keuangan desa, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan menggarap dan mengelola potensi yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Sebab dengan melalui penggarapan potensi desa maka dapat dimanfaatkan dan diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk pembiayaan pembangunan. Untuk itu penulis akan membahas segi kemampuan Kepala Desa bersama aparatnya beserta kemampuan masyarakat dalam pengembangan potensi desa dalam bentuk penggarapan dan pengelolaannya yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, guna dipakai dalam membiayai pembangunan.

Dengan adanya serangkaian gambaran tersebut di atas maka yang menjadi perumusan masalah untuk dibahas adalah:

1. Bagaimana usaha Pemerintah Desa dalam hal pengembangan potensi desa yang dimilikinya dalam bentuk penggarapan dan pengelolaan untuk menunjang pembangunan desa.
2. Sampai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menggarap dan mengelola potensi alam yang tersedia.
3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam usaha peningkatan potensi desa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1.1. Untuk mengetahui bagaimana usaha Pemerintah Desa dalam hal pengembangan potensi desa yang dimilikinya dalam bentuk penggarapan dan pengelolaan.
- 1.2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menggarap dan mengelola potensi alam yang tersedia.

2. Kegunaan Penelitian

- 2.1. Sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya.
- 2.2. Dengan mengetahui masalah yang dihadapi dan pemecahannya, maka Pemerintah Desa dapat menyusun atau mengevaluasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sumber-sumber alamnya.
- 2.3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber kepustakaan bagi yang membutuhkan.

D. Kerangka Konseptual

Agar supaya desa dapat mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada desa, maka kepadanya diwajibkan menggali dan mengelola segala potensi desa sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa yang diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan Undang - Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku se-

karang ini, di mana Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tersebut adalah merupakan penjabaran dari pasal 88 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang berbunyi : "Peraturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan undang-undang". 3)

Setelah penetapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 berjalan kurang lebih lima tahun, barulah dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Diberlakukannya undang-undang ini dengan pertimbangan:

"Bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintah Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif". 4)

Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 pasal 21 mengatakan bahwa:

"Sumber pendapatan, kekayaan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang pelaksanaannya dapat diatur peraturan daerah yang sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri". 5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Daerah Propensi Dati I Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 1984 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, benar-benar dilaksanakan dengan semestinya oleh pemerintah desa.

Salah satu konsep ideal didalam memperoleh pendapatan desa adalah dengan jalan mengolah potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Dimana dengan melalui usaha ini berarti menuntut adanya peranan dan volume kerja pemerintah desa

yang semakin meningkat. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan adanya kemampuan di bidang personil atau manusianya, seperti yang dikemukakan oleh S.P. Siagian:

"Pentingnya peran organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen harus dikaitkan dengan kemampuan manusia di dalam organisasi, karena bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sangat tergantung atas kemampuan manusianya".6)

Dengan adanya badan yang bergerak di bidang pembangunan desa, dalam hal ini pemerintah yang harus mampu menanggapi setiap permasalahan yang timbul di masyarakat. Di mana melalui kemampuan pemerintah, maka tentunya sangat memainkan peranan dalam membangkitkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk melaksanakan program-program pemerintah agar tujuan dari pada pembangunan dapat tercapai.

Di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN, khusus dalam Pembangunan Daerah diamanatkan bahwa:

"Pembangunan masyarakat pedesaan perlu ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk memproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala daya dan dana bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya".7)

Berdasarkan rumusan di atas maka itu berarti bahwa pembangunan desa itu merupakan suatu kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dimana dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Untuk itu pemerintah desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber

daya alam dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparaturnya pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Karena penduduk pedesaan merupakan bagian terbesar dari penduduk yang tingkat hidupnya rendah, maka dalam meningkatkan taraf hidupnya tentu diperlukan dengan adanya peningkatan produktivitas mereka. Dalam usaha peningkatan produktivitasnya maka diperlukan adanya motivasi, peningkatan keterampilan dan teknologi dari pemerintah.

E. Metode Penelitian

1. Dasar dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan dasar studi kasus yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan mengenai pengembangan potensi desa dengan mekanisme pengelolaannya serta masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaannya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bori' Parinding. Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berikut ini akan dijelaskan kedua

cara tersebut yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi ilmiah tentang obyek yang menjadi sasaran penelitian. Data atau informasi ini berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan beberapa perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Cara ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi yang langsung didapatkan di lapangan, guna menunjukkan obyektivitas dalam rangka penulisan laporan.

Kerangka yang demikian itu dilakukan dengan cara:

b.1. Observasi (pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek yang menjadi sasaran penelitian

b.2. Interview (wawancara) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan beberapa responden yang telah dipilih sebagai sampel purposive. Adapun responden yang dimaksud adalah:

a. Pemerintah Desa:

- Kepala Desa = 1 orang
- Lembaga Musyawarah Desa = 13 orang

b. Perangkat Desa:

- Sekretaris Desa = 1 orang
- Kepala Dusun = 8 orang

c. Tokoh dan anggota masyarakat

- Tokoh masyarakat yang berasal

dari kalangan adat, agama, pegawai sipil dan Abri	= 12 orang
- Masyarakat biasa yang terdiri dari petani, industri kecil, pedagang, pertukangan dan dukun bayi	= 20 orang
<hr/>	
Jumlah Responden	= 55 orang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta disebutkan bahwa pengertian usaha adalah : "kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud" 8).

B. Pengertian Pemerintah Desa

Dalam rangka penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa secara nasional, untuk itu maka berikut kutipan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan bahwa :

- "(1) Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Kepala-kepala Dusun" 9).

Selanjutnya dikemukakan pula Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ialah:

Kepala Desa

- "(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
 - b. menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketertarikan dan ketertiban di wilayah desanya;
 - c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat go-

tong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri;
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
 - c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat desa;
 - e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa;
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.

Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/ permufakatan Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi keputusan Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah / mufakat dalam penyusunan Keputusan Desa.

Sekretaris Desa

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pemba-

- ngunan dan kemasyarakatan;
- d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Kepala Dusun

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam Kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

Kepala Urusan

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa" 10).

Demikianlah kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Kepala Desa ditempatkan sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat yaitu sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Di samping itu Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat masyarakat desa, dalam usahanya

untuk menumbuhkan atau mengembangkan semangat membangun di-antara warga desa dengan dijiwai oleh azas usaha bersama dan rasa kekeluargaan.

Begitu beratnya beban tugas Kepala Desa, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seperti penanggung jawab dibantu oleh Perangkat Desa juga dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri dan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah seperti kutipan berikut ini

"Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berkedudukan di Desa maupun di Kelurahan, merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri, serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa / Kelurahan di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di Desa .

Untuk melaksanakan tugas, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- c. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- d. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;

- g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan Keluarga sejahtera;
- h. Membina kerja sama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap" 11).

Dari uraian di atas terlihat betapa berat dan luasnya tugas serta fungsi LKMD itu, dimana merupakan wadah partisipasi masyarakat yang harus bekerja sama atau membantu pemerintah Desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Sedang pengertian desa sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 adalah sebagai berikut:

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia" 12).

Dengan pengertian di atas dapatlah dikatakan bahwa desa adalah merupakan suatu wilayah tertentu yang didiami oleh sejumlah penduduk tertentu pula. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

B. Pengertian Potensi Desa

Pengertian potensi Desa sebenarnya adalah meliputi sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi baik yang sudah terwujud, maupun yang belum terwujud dan yang dapat diharapkan pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa dan masyarakat desanya. Jadi potensi-potensi inilah sebenarnya yang harus digali dan dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan warga masyarakat desanya dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dalam arti yang luas . Di masyarakat desa hambatan-hambatan pokok sebenarnya adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

Untuk itu bagi tugas pembaharu yang ingin memperbaiki dan melancarkan pembangunan desa, perlulah mengetahui dimana letaknya masalah-masalah yang dialami oleh mereka. Sebab kalau mereka sudah mengetahui di mana ujung dan pangkal permasalahan yang dihadapi, maka dengan demikian permasalahan tersebut tidak merupakan lingkaran setan.

Salah satu pemecahan masalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa tersebut adalah dengan penggalian, mengusahakan serta memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam lingkungan desa. Dalam rangka usaha penggalian, perusahaan serta pemanfaatan potensi alam dalam suatu desa hendaknya akan selalu menjamin tata lingkungan desa dan stabilitas desa. Sebab melalui perencanaan, penggalian serta pemanfaatan potensi desa yang terarah, maka benar-benar akan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat desa dan bukan untuk kepentingan perseorangan maupun golongan . Juga dengan melalui cara ini maka akan dapat diharapkan menghindari perusakan-perusakan lingkungan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab .

Menurut Drs. I. Nyoman Beratha dalam bukunya yang berjudul " Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa " disebutkan bahwa :

"Potensi desa itu dapat dibagi menjadi dua bagian

besar yaitu potensi fisik alam dan potensi non fisik/ sosial" 13).

Lebih lanjut mengenai potensi fisik / alam ini dapat diperinci dan meliputi antara lain:

1. Tanah

Tanah merupakan sumber potensi yang sangat penting bagi masyarakat desa. Karena tanah bagi mereka adalah merupakan sumber dan tempat untuk tumpuan penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat desa pada umumnya. Dengan tanah pertanian sawah, misalnya mereka dapat menghasilkan bahan makanan, bahan perdagangan dan kebutuhan lain-lainnya. Maka dapat dibayangkan bagi desa-desa yang sebahagian besar masih bersifat agraris, di mana penduduknya yang sebahagian besar sebagai petani sangat tergantung kepada kesuburan tanah.

Kemudian apabila tanah ditinjau sebagai ruang / space maka tanah wilayah desa dapat pula digunakan untuk fasilitas-fasilitas antara lain:

- a. tempat pemerintahan;
- b. tempat perumahan;
- c. tempat pendidikan;
- d. tempat kesehatan;
- e. tempat perhubungan, keamanan, peribadatan, rekreasi dan lain-lain.

Disamping potensi permukaan tanah seperti dikemukakan di atas, sebenarnya masih terdapat juga potensi - potensi yang terkandung di dalam tanah seperti bahan tambang, mineral, gas bumi, sumber panas dan lain-lain.

2. Air

Potensi air bagi masyarakat desa adalah meliputi mata air yang pemanfaatannya untuk kepentingan rumah tangga, kepentingan irigasi pertanian, kepentingan pariwisata, perikanan dan lain-lainnya. Pengertian air disini adalah meliputi air terjun yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, air laut bagi desa-desa pantai bisa diolah dan dimanfaatkan untuk penggaraman; perikanan, tambak dan lain-lain; mata air panas untuk keperluan pengobatan; dan air hujan yang benar-benar dapat dimanfaatkan bagi daerah-daerah kering. Jadi potensi air itu memang memegang peranan penting dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan bagi warga desa khususnya.

3. Iklim dan Angin

Potensi dari iklim serta angin berperan penting pula bagi daerah desa yang bercirikan agraris. Dengan potensi angin misalnya akan bisa dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak kincir untuk keperluan pengairan. Bagi desa-desa pertanian juga potensi iklim sangat berpengaruh karena dapat dijadikan dasar bagi mereka kapan harus menanam tanaman bahan makanan, menanam tanaman perdagangan dan lain-lain, yang ini semuanya dilaksanakan dengan memperhatikan potensi iklim.

4. Tenaga Kerja

Kerja itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang memang secara sadar dilakukan yang kesemuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan di dalam pengertian kerja ini termasuk ker-

ja fisik dan kerja non fisik, yang menghasilkan dapat saja berupa benda material atau benda non material / jasa .

Pengertian tenaga kerja adalah kekuatan dan atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk dapat melakukan kerja. Khusus tenaga kerja ini sebenarnya adalah bersumber dari penduduk itu sendiri. Jadi semakin besar jumlah penduduk suatu desa maka semakin besar pula potensi tenaga kerja yang tersedia. Untuk jelasnya dapat diadakan penggolongan penduduk menurut umur, dalam kaitannya untuk mengetahui tenaga kerja yang produktif dan tenaga kerja yang tidak produktif.

Penggolongan penduduk menurut umur yang dikemukakan oleh Dr. Nathan Keyfits dan Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro adalah :

"Umur 0 - 14' tahun disebut usia belum produktif
Umur 15- 65 tahun disebut usia produktif
Umur di atas 66 tahun disebut usia improduktif" 14).

Jadi berdasarkan penggolongan umur di atas maka yang merupakan potensi tenaga kerja yang produktif adalah mereka yang berumur antara 15-60 tahun. Tetapi di daerah pedesaan ternyata banyak potensi tenaga kerja anak-anak yang berumur antara 10-15 tahun sudah dapat membantu orang tuanya misalnya mencari kayu, menyabit rumput, menggembala ternak, menjaga air di sawah serta ikut bekerja di sawah maupun di ladang milik orang tuanya.

Masalah pokok yang terjadi di desa adalah masalah pemanfaatan potensi tenaga kerja produktif di desa. Karena pada desa yang masih bermata pencaharian pertanian maka kelebihan tenaga kerja dalam arti masih banyak potensi tenaga ker-

ja yang usia produktif belum bisa dimanfaatkan, sehingga terdapatlah apa yang disebut pengangguran tersembunyi.

Menurut Ragnar Nurkse terjadinya pengangguran tersembunyi di samping disebabkan oleh masalah-masalah kependudukan seperti diutarakan di atas, juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti sebab -sebab sosial dan sebab ekonomis" 15). Mengenai hal ini adapun pemecahannya yang dapat dilakukan dengan:

- a. Memindahkan kelebihan penduduk dari desa-desa yang masih bercirikan agraris dengan jalan mempekerjakan pada proyek-proyek bendungan untuk irigasi, pembangunan saluran air, pembangunan jalan-jalan raya, perumahan dan lain-lain. Sehingga dengan demikian potensi tenaga kerja usia produktif bisa dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan.
- b. Hendaknya segera diciptakan lapangan kerja baru seperti industri kecil.
- c. Mengadakan dan menyelenggarakan Sekolah Kerja sehingga begitu mereka menyelesaikan pendidikan bisa segera mempunyai keahlian pada bidang tertentu dan mampu pula berwiraswasta.
- d. Pembukaan tanah baru yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk pertanian.
- e. Melaksanakan transmigrasi baik transmigrasi lokal maupun nasional sehingga dengan cara ini diharapkan pemecahan-pemecahan pemilikan tanah di desa asal dapat dihindari. Sebab dengan transmigrasi ini akan memberikan

jaminan tanah garapan bagi petani transmigran.

- f. Mengusahakan elektrifikasi di pedesaan sehingga dengan di pedesaan, agar lebih memungkinkan pengembangan berbagai potensi di pedesaan.

Berkaitan dengan rangkaian potensi tenaga kerja, maka ternak-pun di desa adalah juga merupakan serta memberikan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat desa karena:

- a. Ternak memiliki potensi sumber tenaga yang bisa dimanfaatkan bagi petani. Seperti ternak sapi, kuda, kerbau, lembu dan lain-lain di mana hewan tersebut dapat dipergunakan untuk mengolah sawah di samping sebagai tenaga angkutan dan lain-lain.
- b. Ternak bagi masyarakat desa umumnya dan petani khususnya adalah sebagai alat tabungan. Karena makin banyak jumlah ternak yang dimiliki petani berarti secara tidak langsung akan makin besar pula sumber keuangan yang dimiliki oleh petani.
- c. Ternak juga bagi petani dapat merupakan sumber bahan makanan dalam rangka meningkatkan gizi keluarga petani di desa.

Di samping potensi fisik / alam seperti yang telah diuraikan di atas, maka pada masyarakat desa diketemukan pula potensi non fisik yang meliputi antara lain:

- a. Masyarakat desa itu sendiri yang kehidupan dan penghidupannya berdasarkan gotong royong adalah merupakan potensi kekuatan ampuh bagi pembangunan desanya.
- b. Lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan yang ada di

desa merupakan potensi yang positif juga bagi pembangunan desanya.

- c. Perangkat Desa adalah merupakan potensi yang cukup menentukan dalam rangka menjamin kelancaran roda pemerintahan desa.

Berbicara mengenai potensi maka tentunya potensi desa yang satu dengan potensi desa yang lain tidak sama. Karena ada desa yang memiliki potensi yang tinggi dan ada pula desa yang mempunyai potensi sedang dan malah ada yang berpotensi rendah. Dengan adanya perbedaan potensi yang dimiliki pada setiap desa maka ada rangkaian erat di dalam menentukan nilai suatu desa baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sebab nilai suatu desa sangat ditentukan dan tergantung kepada potensi-potensi yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan.

BAB III

GAMBARAN KHUSUS LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Bori' Parinding

A.1. Keadaan Alam

Desa Bori' Parinding adalah sebuah Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, dengan letak ketinggiannya kurang lebih 850 meter dari permukaan laut.

Keadaan iklim desa ini tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja yang pada umumnya beriklim tropis dan sejuk. Sedangkan musim hujan umumnya jatuh pada bulan September sampai dengan bulan Mei, dengan curah hujan rata-rata 378 sampai 453 mm/ tahun. Luas dari pada Desa Bori' Parinding adalah 3.245 ha atau 32,45 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sangakungan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tallunglipu/Kelurahan Tikala Kecamatan Rantepao.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pangli Palawa'.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sesean Matallo.

Jarak Desa Bori' Parinding dari ibu kota Kecamatan Sesean adalah 2 km dan dari ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sekitar 26 km, sedangkan dari ibu kota Pro - pinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan kira-kira 338 km.

Desa Bori' Parinding kalau dilihat dari pola pemanfaatan wilayahnya maka ditandai dengan ciri-ciri dari penggunaan

tanah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1

KEADAAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA BORI' PARINDING
KEC. SESEAN KAB. DATI II TANA TORAJA, TAHUN 1990

JENIS PENGGUNAAN TANAH	LUAS (Ha)	PROSENTASE
Persawahan	253,31	7,81
Tegalan/ladang	658,53	20,30
Pekarangan	458,24	14,12
Jalan desa	105,00	3,24
Lapangan	4,03	0,11
Tanah yang belum digarap	1.765,89	54,42
J U M L A H	3.245,00	100,00

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Pebruari 1990

Di dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari lahan yang ada di Desa Bori' Parinding belum dapat dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan teknologi serta kondisi alamnya banyak yang merupakan daerah yang berbukit-bukit batu. Seluruh lahan yang ada masih banyak dikelola oleh penduduk dengan cara tradisional, kecuali dalam beberapa cara pengolahan tanaman sudah menggunakan semi teknologi namun hasilnya belum diperoleh secara maksimal. Seluruh hasil bumi masih merupakan bahan untuk konsumsi dalam daerah saja kecuali beberapa tanaman industri seperti kopi, cengkeh dan coklat yang hasilnya sudah ada penduduk pergi menjualnya ke pasar Rantepao, sebagai pusat perekonomian daerah Tana Toraja.

A.2. Sejarah Singkat Desa Bori' Parinding

Nama dari pada Desa Bori' Parinding ini berasal dari dua buah suku kata yaitu :

1. Bori'

- Bo artinya pancuran (sebutan dalam bahasa Tana Toraja adalah Saruran);
- Ri artinya air (sebutan dalam bahasa Tana Toraja adalah wai).

Jadi Bori' berarti pancuran air, karena pada tempat ini terdapat mata air yang terdiri dari 7 buah pancuran yang diberi nama oleh masyarakat setempat dengan sebutan Saruran Bulaan (pancuran emas) yang berarti sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya.

2. Parinding

- Pa artinya batu;
- Rinding artinya dinding.

Jadi Parinding bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah batu yang menyerupai dinding atau disebut juga dinding batu.

Secara keseluruhan pengertian Bori' Parinding adalah air pancuran yang mengalir melalui dataran di samping batu yang menyerupai dinding, dimana mata air tersebut sekaligus dapat merupakan pengairan bagi sawah-sawah masyarakat dan juga dijadikan sebagai sumber air bagi Desa Bori' Parinding serta ibu kota Kecamatan Sesean.

Pada Zaman dahulu yaitu zaman pemerintahan Belanda, Desa Bori' Parinding terdiri dari 3 (tiga) kampung yaitu :

- a. Kampung Bori' dikepalai oleh Ne' Tallu.
- b. Kampung Deri dikepalai oleh Palittin.
- c. Kampung Parinding dikepalai oleh J.B. Rura.

Perkembangan selanjutnya setelah terbentuknya pembentukan Desa Gaya Baru di propensi Sulawesi Selatan, maka ke tiga kampung di atas digabungkan menjadi satu Desa yang diberi nama oleh masyarakat setempat dengan sebutan Lembang Bori' Deri Parinding . Pada tahun 1969 Lembang Bori' Deri Parinding dikepalai oleh Johanis Ruru sampai tahun 1976.

Dan pada tahun 1976 Lembang Bori' Deri Parinding diroboh menjadi Desa Bori' Parinding yang dikepalai oleh Johanis Patiung sampai tahun 1977. Kemudian pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1983 Desa Bori' Parinding dikepalai oleh A. Sampewai . Dan tahun 1984 sampai sekarang Desa Bori' Parinding dikepalai oleh Hermina Pasolang .

B. Potensi Desa Bori' Parinding

Pembangunan desa bisa berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh desa maupun bantuan dari luar desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang sasarannya dititikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pembangunan desa harus dilaksanakan secara serius dengan menggunakan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh desa.

Penggunaan potensi semaksimal mungkin untuk dipakai dalam pembangunan adalah merupakan hal yang wajar karena semata-mata digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam rangka mengelola potensi alam yang tersedia dalam desanya demi kemakmuran masyarakat itu sendiri. Peningkatan kemampuan warga desa dalam mengolah dan memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia di dalam wilayahnya bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi memerlukan berbagai macam usaha pembinaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam hubungan ini peningkatan kemampuan warga desa untuk mengelola serta memanfaatkan sumber-sumber alam, dapat dicapai dengan jalan melalui perencanaan yang disusun secara sistimatis oleh pemerintah dengan memperhatikan potensi-potensi yang terdapat dalam desanya.

Dalam rangka mewujudkan hal ini maka perlu dibicarakan dalam suatu forum musyawarah desa yang melibatkan sejumlah unsur guna melengkapi dan memberikan saran untuk kesempurnaan suatu perencanaan. Sebab banyak pengalaman menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sering mengalami kegagalan oleh karena perencanaan / penyusunan program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan potensi desa yang bersangkutan. Keberhasilan ini dapat dicapai dengan berdasarkan pembinaan / bimbingan Direktorat Pembangunan Desa yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian yang seksama mengenai kedudukan daerah pedesaan dalam rangka pembangunan desa.
2. Meningkatkan bekal pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa ke arah peningkatan produktivitas.
3. Mengadakan pemupukan permodalan masyarakat desa ke arah peningkatan termasuk menstimuler perkreditan desa.
4. Meningkatkan usaha gotong royong dan swadaya masyarakat dengan bantuan materil kepada desa.
5. Mengaktifkan struktur pemerintahan desa disertai dengan peningkatan efektivitas dan sinkronisasi lembaga desa". 16)

Berdasarkan tugas tersebut di atas berarti desa cukup mempunyai peluang besar untuk lebih berkembang ke arah yang lebih baik, karena adanya perhatian pemerintah dalam membantu pemerintah desa baik berupa bantuan materil maupun pembiayaan yang memotivasi partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Tetapi bantuan-bantuan itu tidaklah mencukupi untuk dipakai membiayai berbagai sektor pembangunan di desa. Oleh karena itu kepada pemerintah desa diharapkan agar benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut sebagai suatu pe-rangsang untuk lebih banyak mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan jalan menggali dan mengolah potensi yang dimiliki desa.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan program atau rencana pembangunan yaitu hendaknya memperhatikan bagaimana keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang diinginkan. Karena partisipasi dan swadaya masyarakat itu adalah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang paling potensial dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Dalam hal mengusahakan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan terlebih dahulu meningkatkan kualitas kepemimpinan yang lebih demokratis, mengusahakan jalur komunikasi yang lebih integratif antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu kepemimpinan yang bersifat demokratis perlu dimiliki oleh seorang Kepala Desa bersama aparatnya, karena dengan sifat kepemimpinan yang demikian ini

akan menimbulkan suatu kesan bagi masyarakat bahwa mereka merasa terwakili oleh Kepala Desa beserta aparatnya, disamping itu pemerintah desa memperoleh dukungan dari masyarakat desa dalam melaksanakan pemerintahan. Demikian pula komunikasi yang lancar antara pemerintah desa dengan masyarakat adalah merupakan salah satu syarat untuk lebih mendapatkan simpatisan dari masyarakat guna berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam kaitan ini pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat turut pula menentukan baik tidaknya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, karena aspek ini menyangkut tingkat penerimaan masyarakat atas berbagai program pembangunan yang diperkenalkan kepada masyarakat desa.

Dari uraian di atas terlihat bahwa sumber-sumber pembiayaan yang potensial bagi pembangunan desa yang dapat dilihat dari dua aspek yaitu peran serta dan swadaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakam dalam pedoman program umum pembangunan masyarakat desa dalam rangka strategi dan era pembangunan dua puluh lima tahun yaitu:

- "1. Bentuk-bentuk swadaya masyarakat yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:
 - a. Gotong royong materi
 - b. Gotong royong tenaga
 - c. Tabungan individual (modal swasta)
2. Bentuk-bentuk bantuan dari luar berupa:
 - a. Bantuan Pemerintah Daerah
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat
 - c. Bantuan yang datang dari sistim perbankan" 17).

Jadi jelaslah bahwa sumber-sumber pembangunan desa itu berasal dari swadaya masyarakat yang berupa gotong royong baik materil maupun tenaga dan demikian pula bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Untuk itu bagi Pemerintah Desa Bori' Parinding, sedang berusaha meningkatkan potensi yang dimilikinya dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan seperti apa yang telah diuraikan di atas. Adapun potensi dari pada Desa Bori' Parinding yang dimaksud adalah:

B.1. Potensi Sosial

Mengenai potensi sosial yang dimiliki desa ini, maka dapat dibagi atas dua bahagian yaitu:

a. Keadaan Penduduk

Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja masih bersifat homogen baik dilihat dari segi etnis, lapangan kerja maupun agama. Namun hal ini tidak berarti bahwa desa ini masih tertutup dengan pengaruh dari luar. Perubahan hampir tampak dalam berbagai kegiatan tetapi masyarakat tidak mudah melepaskan diri dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya dalam lapangan kerja pada umumnya penduduk desa tersebut terlibat di dalam pekerjaan tertentu seperti pegawai, ABRI, industri rumah tangga tetapi juga masih tetap terlibat dalam lapangan kerja sebagai petani.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan penduduk desa Bori' Parinding, maka berikut ini disajikan gambaran tentang keadaan penyebaran penduduk dalam setiap wilayah dusun yang berada di dalam desa Bori' Parinding sebagai berikut:

TABEL 2

DISTRIBUSI PENDUDUK DALAM SETIAP DUSUN DI DESA
BORI' PARINDING KEC. SESEAN KABUPATEN DATI
II TANA TORAJA, TAHUN 1990

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK			%
		PRIA	WANITA	JUMLAH	
1	Bori' Tanga	467	533	1.000	19,41
2	Bori' Lombongan	359	363	722	14,01
3	Bori' Rantele- tok Matallo	248	283	531	10,31
4	Bori' Rantele- tok Matampu'	347	412	759	14,73
5	Buntu La'bi'	281	269	550	10,67
6	Deri	252	291	543	10,54
7	Parinding Ma- tallo	257	261	518	10,05
8	Parinding Ma- tampu'	272	257	529	10,28
J U M L A H		2.483	2.669	5.152	100,00

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Februari 1990

Tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi penduduk dalam setiap wilayah dusun tidak merata. Hal ini terjadi karena kegiatan ekonomi yang cenderung memusat pada beberapa dusun yang dekat dengan daerah perkotaan.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang ditempati maka dapatlah diketahui kepadatan penduduk Desa Bori' Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja. Sehubungan dengan itu maka berikut ini akan disajikan

tabel tentang jumlah penduduk diperinci menurut luas wilayah dan kepadatannya sebagai berikut:

TABEL 3

JUMLAH PENDUDUK DESA BORI' PARINDING DIPERINCI
MENURUT LUAS WILAYAH DAN KEPADATANNYA, TAHUN 1990

NO	NAMA DUSUN	JLH. PEN- DUDUK (Jiwa)	LUAS WILAYAH (Km ²)	KEPADATAN (Jiwa/Km ²)
1	Bori' Tanga	1.000	3,31	302
2	Bori' Lombongan	722	3,84	188
3	Bori' Ranteletok Matallo	531	4,11	129
4	Bori' Ranteletok Matampu'	759	4,19	181
5	Buntu La'bi'	550	4,62	119
6	Deri	543	4,38	124
7	Parinding Matallo	518	3,50	148
8	Parinding Matampu'	529	4,50	118
J U M L A H		5.152	32,45	159

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Pebruari 1990

Di dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa luas wilayah desa Bori' Parinding adalah 32,45 km², sedang jumlah penduduknya adalah 5.152 jiwa. Dengan demikian berarti kepadatan penduduk rata-rata adalah 159 jiwa/km².

Dari tabel itu pula dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dusun Bori' Tanga adalah 1.000 jiwa, sedang luas wilayah dusun tersebut adalah 3,31 km². Dengan demikian kepadatan

penduduknya rata-rata adalah $302/\text{km}^2$.

Penduduk dusun Bori' Lombongan berjumlah 722 jiwa dengan menempati wilayah seluas $3,84 \text{ km}^2$. Dengan demikian kepadatan rata-rata penduduk yang ada dusun tersebut adalah $188 \text{ jiwa}/\text{km}^2$.

Luas wilayah dusun Bori' Ranteletok Matallo adalah $4,11 \text{ km}^2$, yang dihuni oleh penduduk sebanyak 531 jiwa. Dan mengenai kepadatan rata-ratanya adalah $129 \text{ jiwa}/\text{km}^2$.

Jumlah penduduk yang ada dalam dusun Bori' Ranteletok Matampu' adalah sebesar 759 jiwa. Penduduk dusun tersebut menempati wilayah seluas $4,19 \text{ km}^2$. Dengan demikian berarti kepadatan rata-rata penduduk di dusun tersebut adalah $181 \text{ jiwa}/\text{km}^2$.

Dusun Buntu La'bi yang mempunyai luas $4,62 \text{ km}^2$ ditempati oleh penduduk sebanyak 550 jiwa. Kepadatan rata-rata penduduk yang dimiliki dusun tersebut adalah $119/\text{km}^2$.

Jumlah penduduk dari dusun Deri adalah 543 jiwa, sedang luas wilayah yang ditempati adalah $4,38 \text{ km}^2$. Kepadatan rata-rata penduduk yang dimiliki dusun tersebut adalah $124 \text{ jiwa}/\text{km}^2$.

Selanjutnya bagi dusun Parinding Matallo yang memiliki luas $3,50 \text{ km}^2$ dihuni oleh penduduk sebesar 518 jiwa. Dengan demikian kepadatan rata-rata penduduk dusun tersebut adalah $148 \text{ jiwa}/\text{km}^2$.

Dan yang terakhir adalah dusun Parinding Matampu' yang luas wilayahnya adalah $4,50 \text{ km}^2$ yang dihuni oleh penduduk sebanyak 529 jiwa. Dengan demikian kepadatan rata-rata pen-

duduk dari dusun tersebut adalah 118 jiwa/km².

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa Desa Bori' Parinding termasuk desa yang kurang padat penduduknya. Dikatakan demikian oleh karena di dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1960 disebutkan bahwa kepadatan penduduk untuk negara Republik Indonesia dikategorikan ke dalam empat jenis yaitu:

1. Daerah dengan penduduk yang tidak padat (1 - 50 jiwa per km²).
2. Daerah dengan penduduk yang kurang padat (50 - 250 jiwa per km²).
3. Daerah dengan penduduk yang sangat padat (450 ke atas per km²)". 18)

Dengan berdasarkan pada kutipan tersebut maka makin jelas bahwa desa Bori' Parinding dikategorikan sebagai desa yang kurang padat penduduknya.

Selanjutnya dapat pula dilihat bagaimana keadaan penduduk desa Bori' Parinding menurut tingkat umur berdasarkan tabel yang disajikan di bawah ini:

TABEL 4

KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT UMUR DI DESA BORI'
PARINDING KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II TANA TORAJA, TAHUN 1990

NO	TINGKAT UMUR (TAHUN)	PENDUDUK		JUMLAH (Jiwa)	%
		PR IA	WANITA		
1	0 - 4	402	391	793	15,39
2	5 - 9	420	442	862	16,73
3	10 - 14	415	410	825	16,01
4	15 - 19	189	241	430	8,35
5	20 - 24	103	144	247	4,79
6	25 - 29	94	146	240	4,66
7	30 - 34	112	134	246	4,77
8	35 - 39	132	114	246	4,77
9	40 - 44	95	117	212	4,11
10	45 - 49	110	115	225	4,38
11	50 - 54	95	135	230	4,46
12	55 - 59	195	169	364	7,07
13	60 - 64	81	79	160	3,11
14	65 ke atas	40	32	72	1,40
J U M L A H		2.483	2.669	5.152	99,97

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Februari 1990

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang produktif lebih tinggi jumlahnya dari pada jumlah penduduk yang belum produktif. Penduduk yang dianggap belum produktif di desa Bori' Parinding adalah penduduk yang

tergolong dalam usia 0 sampai 14 tahun (2.480 jiwa) ditambah dengan penduduk berusia 65 ke atas (72 jiwa). Dengan demikian jumlah penduduk yang belum produktif adalah 2552 jiwa atau sebesar 49.53 %, sedang jumlah penduduk yang dianggap produktif adalah yang berusia antara 15 - 64 tahun yaitu sebanyak 2.600 jiwa atau sebesar 50.47 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Jumlah penduduk dalam usia kerja ini tentunya memerlukan lapangan kerja yang luas guna menghindari terjadinya pengangguran yang berlebihan . Karena dengan tersedianya lapangan kerja diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penduduk desa yang bersangkutan guna dipakai memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Bagi kelompok usia anak-anak, tentu merupakan suatu beban bagi penduduk produktif, karena besarnya jumlah anak-anak dalam masyarakat yang justru akan membawa beban berat bagi perekonomian. Hal ini disebabkan oleh karena anak-anak semata-mata hanya sebagai konsumen dan bukan sebagai produsen. Di samping perbedaan jumlah penduduk yang produktif dengan jumlah penduduk yang belum produktif masih terdapat masalah lain seperti adanya kebiasaan untuk tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada wanita. Oleh sebab itu beban penduduk produktif lebih banyak ditanggung oleh pria.

Berikut ini disajikan tabel mata pencaharian dari pada penduduk desa Bori' Parinding adalah sebagai berikut:

TABEL 5

KEADAAN PENDUDUK DESA BORI' PARINDING KECAMATAN
SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA,
DIPERINCI MENURUT LAPANGAN KERJA, TAHUN 1990

NO	JENIS LAPANGAN KERJA	JUMLAH PENDUDUK	%
1	Pertanian	1.235	85,11
2	Kerajinan Tangan	50	3,45
3	Perdagangan	4	0,28
4	Pengangkutan	3	0,21
5	Pegawai	95	6,55
6	Tukang Kayu	47	3,24
7	Dukun Bayi	15	1,03
8	Pandai Besi	2	0,14
J U M L A H		1.451	100,01

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Pebruari 1990

Dengan melihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa dari 2.600 orang penduduk produktif hanya terdapat 1.451 jiwa yang terlibat aktif dalam lapangan kerja tertentu. Ini berarti hanya 55,81 % yang bekerja secara aktif, sementara sisanya sebanyak 1.149 jiwa atau sebanyak 44,19 % tergolong tenaga kerja produktif tetapi tidak aktif. Jikalau dibanding dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, maka diperoleh jumlah penduduk yang benar-benar produktif adalah hanya sebesar 28,16 persen. Jadi bagi tenaga kerja yang benar-benar produktif merupakan suatu beban berat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dari pada penduduk yang sifatnya konsumen.

b. Keadaan Lembaga-Lembaga di Desa Bori' Parinding

Mengenai lembaga-lembaga di desa ini yang akan dibahas maka ada beberapa lembaga sebab peranannya telah dirasakan masyarakat. Adapun lembaga-lembaga tersebut yaitu:

1. Lembaga Pendidikan

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan instansi yang terkait untuk memajukan pendidikan bagi masyarakat adalah dengan jalan memberikan motivasi atau rangsangan akan kesadaran warga masyarakat desa atas peranan dan pentingnya pendidikan dalam kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Media yang digunakan seperti rapat, pertemuan yang sifatnya tidak formil, memberikan pendidikan kalau ada pesta-pesta dan lain-lain. Dimana usaha ini merupakan suatu dasar yang kuat untuk meningkatkan frekwensi perkembangan pendidikan bagi warga masyarakat desa.

Dengan keberhasilan ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, maka dapatlah dikatakan bahwa sudah mengarah kepada perwujudan tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia-manusia pembangunan yang cerdas dan calon penerus dan pengisi era pembangunan negara Indonesia.

Kemajuan tingkat pendidikan penduduk desa Bori' Parinding yang tidak atau sudah mengecap ilmu pengetahuan atau pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 6

KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI DESA BORI' PARINDING KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA, TAHUN 1990

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK	%
1	Tidak/belum tamat SD	2.115	41,05
2	SD	1.144	22,20
3	SLTP	1.110	21,55
4	SLTA	708	13,74
5	Sarjana Muda	10	0,19
6	Lain-lain	65	1,26
J U M L A H		5.152	99,99

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Pebruari 1990

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk desa Bori' Parinding yang jumlahnya 5.152 jiwa sebagian besar masih berada pada tingkat pendidikan tidak/belum tamat SD yaitu sebanyak 2.115 orang atau sebesar 41,05 %. Jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikannya pada tingkat SD adalah 1.144 orang atau sebesar 22,20 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Selanjutnya mereka yang telah menikmati pendidikan sampai pada tingkat SLTP 1.110 orang atau sebesar 21,55 %. Menyusul mereka yang berhasil tamat SLTA adalah 708 orang atau sebanyak 13,74 %. Sedangkan yang tamat Sarjana Muda adalah 10 orang atau sebesar 0,19 %. Kemudian sisanya sebesar 65 orang atau sebanyak 1,26 % termasuk ke dalam kelompok lain-lain yaitu mereka yang buta huruf.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa Bori' Parinding telah mengikuti pendidikan bahkan ada yang sedang terlibat dalam bidang pendidikan tertentu. Dengan adanya tingkat pendidikan yang baik pada desa ini, maka patutlah disambut dengan baik karena dapat berpengaruh kepada masyarakat dalam memudahkan menerima pembaharuan yang diperkenalkan oleh pemerintah.

Untuk menunjang kemajuan pendidikan kepada warga masyarakat desa Bori' Parinding, telah dibangun fasilitas pendidikan. Agar dapat diketahui mengenai penyebaran prasarana pendidikan di desa ini, maka berikut ini disajikan tabelnya sebagai berikut:

TABEL 7

PENYEBARAN PRASARANA PENDIDIKAN DALAM SETIAP DUSUN DI DESA BORI' PARINDING KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA, TAHUN 1990

NO	NAMA DUSUN	JENIS PRASARANA			JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	
1	Bori' Tanga	1	1	-	2
2	Bori' Lombongan	1	-	-	1
3	Bori' Ranteletok Matallo	-	-	-	-
4	Bori' Ranteletok Matampu'	1	-	-	1
5	Buntu La'bi	1	-	-	1
6	Deri	-	-	-	-
7	Parinding Matallo	1	-	-	1
8	Parinding Matampu'	-	-	-	-
J U M L A H		5	1	-	6

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Februari 1990

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyebaran prasarana pendidikan pada setiap dusun belum merata. Walaupun demikian, lokasi dari pada prasarana pendidikan antara dusun dengan dusun yang lain tidak terlalu berjauhan sehingga dapat dijangkau oleh anak-anak sekolah untuk memperoleh pendidikan. Prasarana pendidikan yang telah dibangun di desa ini adalah berupa gedung SD sebanyak 5 buah dan gedung SLTP sebanyak 1 buah. Sedangkan gedung SLTA hanya terdapat di kelurahan Pangli Palawa' sebagai ibu kota kecamatan Sesean, yang kebetulan bertetangga dekat dengan desa ini.

Mengenai tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan prasarana pendidikan yang ada dalam desa ini maka termasuk sudah tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya anak mereka yang sudah usia sekolah pada umumnya diberikan kesempatan untuk pergi sekolah.

2. Lembaga Kesehatan

Kesehatan bagi masyarakat adalah merupakan suatu prasyarat untuk membentuk manusia yang giat berpikir, berkarya maka itulah sekarang ini telah banyak diusahakan peningkatannya guna menuju kepada masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilaksanakan sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memperbaiki umat manusia pada tahun-tahun belakangan ini, sehingga mengakibatkan semakin bertambah besar pula minat dan pengertian orang untuk memelihara dan memperbaiki kesehatan mereka dan keluarganya.

Pembinaan kesehatan terhadap masyarakat yang dilakukan

oleh pemerintah desa melalui kerja sama dengan dinas kesehatan Kabupaten maupun Puskesmas Kecamatan adalah bertujuan untuk merubah pola kesehatan masyarakat yang masih tradisional, yang dapat menghambat program pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan.

Usaha-usaha yang ditempuh oleh pemerintah untuk merubah cara-cara kesehatan yang sifatnya merugikan adalah memberikan pengertian atau motivasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan secara baik fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Penyuluhan yang dilaksanakan pemerintah desa bersama pegawai kesehatan adalah dengan jalan memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang mengatur kebersihan lingkungan, petunjuk untuk berobat serta memanfaatkan pekarangan rumah yang kosong di depan atau sekitarnya untuk ditanami sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

Melalui usaha penyuluhan yang diadakan pemerintah desa Bori' Parinding bersama pegawai kesehatan kepada masyarakat maka telah banyak membawa dampak positif di kalangan masyarakat seperti dapat dilihat dari jumlah pemilikan jamban keluarga, pengunjung ke fasilitas kesehatan dan lain-lain. Dampak dari pada penyuluhan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah semakin banyaknya penduduk datang ke tempat-tempat pengobatan baik dalam desa ini maupun ke ibu kota kecamatan. Sehubungan dengan itu berikut ini disajikan tabel tentang jumlah penduduk yang memanfaatkan sarana pengobatan yang ada dalam desa Bori' Parinding sebagai berikut:

TABEL 8

JUMLAH PENDUDUK YANG MEMANFAATKAN SARANA PENGOBATAN
DI DESA BORI' PARINDING KECAMATAN SESEAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA, TAHUN 1990

NO	TEMPAT PENGOBATAN	PERKEMBANGAN				JUMLAH
		1986	1987	1988	1989	
1	Klinik Desa	342	455	596	784	2.177
2	Posyandu	195	278	387	498	1.358
J U M L A H		537	733	983	1.282	2.535

Sumber; Arsip Klinik Desa dan Posyandu, Pebruari 1990

Berdasarkan tabel tersebut di atas bisa memberikan gambaran bahwa penggunaan sarana kesehatan oleh masyarakat pada setiap tahun mengalami kemajuan. Dengan adanya peningkatan ini, maka itu berarti tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi tentang pentingnya kesehatan bagi hidup mereka.

3. Lembaga Keagamaan

Mengenai lembaga keagamaan di desa Bori' Parinding telah menunjukkan kemajuan oleh karena pada setiap dusun ada Rumah Ibadah berupa gedung Gereja sebanyak 10 buah. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang pemuka masyarakat diperoleh data bahwa Rumah Ibadah (Gereja) tersebut selain digunakan sesuai dengan maksud utamanya yaitu tempat beribadah, tempat melaksanakan kegiatan keagamaan serta upacara - upacara keagamaan, juga sebagai wadah dan media komunikasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat.

Gereja sebagai media komunikasi dapat digunakan oleh pemerintah dalam usaha meningkatkan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Selain itu gereja juga berfungsi sebagai wadah pembinaan mental masyarakat dalam menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. Tempat-tempat ibadah ini dibangun dengan prakarsa dan swadaya murni masyarakat setempat.

Untuk mengetahui tentang komposisi penduduk desa Bori' Parinding yang diperinci menurut dusun, agama dan jenis kelamin maka ada pun tabel sebagai berikut:

TABEL 9

KOMPOSISI PENDUDUK DESA BORI' PARINDIG DIPERINCI
MENURUT DUSUN, AGAMA DAN JENIS KELAMIN, TAHUN 1990

NAMA DUSUN	A G A M A						JUMLAH	
	K R I S T E N				ALUKTA			
	PROTESTAN		KATOLIK		L	P	L	P
	L	P	L	P				
Bori' Tanga	336	404	104	106	27	23	467	533
Bori' Lombongan	308	304	35	40	16	19	359	363
Bori' Ranteletok Matallo	170	199	58	62	20	22	248	283
Bori' Ranteletok Matampu'	275	340	53	52	19	20	347	412
Buntu La'bi	138	113	125	131	18	25	281	269
Deri	89	134	159	149	7	8	252	291
Parinding Matallo	229	231	18	22	10	8	257	261
Parinding Matampu'	244	224	16	19	12	14	272	257
J U M L A H	1789	1949	565	581	129	139	2483	2669

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Pebruari 1990

Tabel di atas menunjukkan bahwa di desa Bori' Parinding terdapat dua aliran agama / kepercayaan yaitu agama Kristen dan Aluk Todolo. Agama Kristen dapat dibagi atas dua macam yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik

Dilihat dari jumlah penganut agama maka agama Kristen Protestan merupakan agama yang paling banyak penganutnya yakni sebanyak 3.738 orang atau sebesar 72,56 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Menyusul agama Kristen Katolik dengan jumlah penganut 1.146 orang atau sebesar 22,24 persen. Sedangkan yang terakhir adalah agama Aluk Todolo (Alukta) yang merupakan kepercayaan / agama asli orang Toraja dengan jumlah penganut 268 orang atau sebesar 5,20 %.

Kendati pun di desa ini terdapat lebih dari satu agama yang dianut oleh penduduk namun di dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya toleransi beragama yang tinggi. Hal ini merupakan modal besar bagi pemerintah desa Bori' Parinding dalam menggalang kesatuan dan persatuan di antara penganut agama di desa tersebut sehingga akan memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

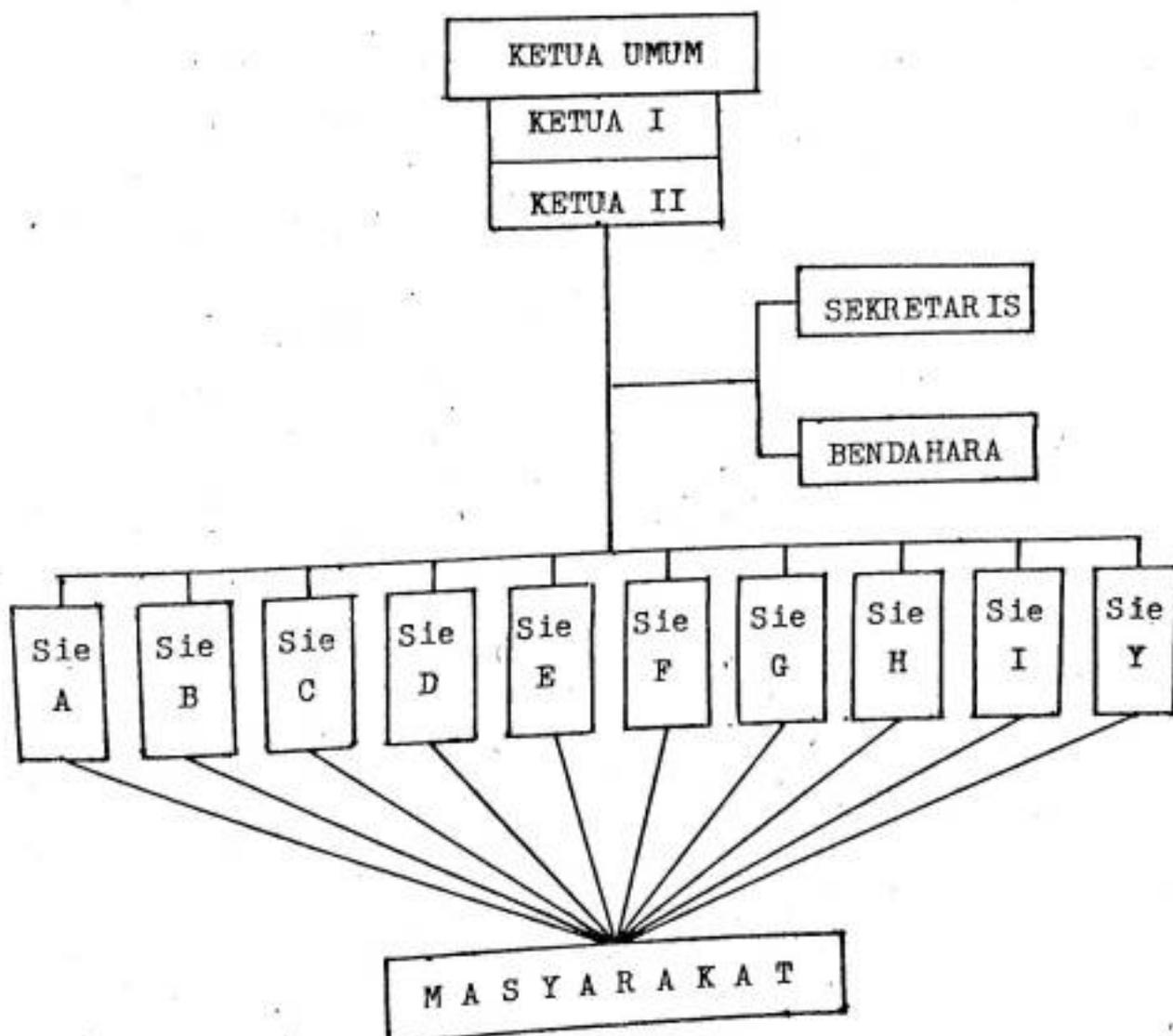
4. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 pasal 5 dikatakan bahwa tugas pokok LKMD adalah membantu Pemerintah Desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa. Sedangkan kedudukannya dalam desa adalah bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan tugas pokok LKMD secara keseluruhan baik di Desa Bori' Parinding maupun di desa-desa lainnya di Indonesia adalah:

- Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah.
- Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara aktif dan positif.
- Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan desa.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
DI DESA BORI' PARINDING



Keterangan:

Seksi A tentang Agama.

Seksi B tentang P4.

Seksi C tentang Pendidikan dan Penerangan.

Seksi D tentang Kamtibmas.

Seksi E tentang Lingkungan Hidup.

Seksi F tentang Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi.

Seksi G tentang Kesehatan, Kependudukan dan KB.

Seksi H tentang Pemuda, Olahraga dan Kesenian.

Seksi I tentang Kesejahteraan Sosial.

Seksi Y tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pada setiap seksi diketuai oleh seorang ketua seksi dan dalam keadaan tertentu seorang anggota pengurus dimungkinkan mengetuai beberapa seksi. Hal ini dimaksudkan bilamana jumlah tenaga atau pimpinan lembaga yang ada di Desa Bori' Parinding berhalangan atau kekurangan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, dibagi atas beberapa wilayah dan jenis kegiatan dengan membentuk kelompok - kelompok kerja pada setiap wilayah sesuai dengan keperluan dan pada setiap seksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Bori'Parinding adalah suatu gerakan pembangunan melalui keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai sasaran dan mempunyai peran utamanya untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

Sedangkan mengenai tujuan dari pada PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera agar dapat menikmati ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir maupun batin dalam tata kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan tujuan dan peranan PKK dalam pembangunan maka sasaran utama dalam usaha pembinaan keluarga pada umumnya adalah:

- Menumbuhkan kesadaran dan kesempatan kepada kaum wanita untuk berpartisipasi secara aktif dalam gerakan PKK.
- Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kaum wanita.
- Mempercepat proses sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir dan cara berperilaku dalam masyarakat sehingga dapat berorientasi pada pembangunan.
- Mengusahakan terciptanya tenaga-tenaga terampil dalam kaum wanita.
- Membantu pemerintah dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat khususnya kaum wanita.

Dalam usaha mencapai tujuan PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang menikmati ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir maupun batin, maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan 10 program pokok PKK. Bagi pemerintah desa Bori' Parinding telah berusaha membina kaum wanitanya melalui pemberian kursus membikin kue, swlamenyulam dan juga membeli beberapa lusin piring, cangkir serta perkakas lainnya yang kesemuanya ini disimpan di kantor desa, yang pemanfaatannya kalau ada kegiatan.

Sedangkan mengenai lembaga-lembaga lainnya seperti Karang Taruna dan Kepramukaan kurang memainkan peranan di tengah-tengah masyarakat, kecuali ada satu lembaga tradisional yang keikutsertaannya didalam melaksanakan pembangunan di desa tersebut dirasakan oleh masyarakat yaitu Saroan. Sebab dengan adanya saruan ini, telah banyak membantu pemerintah desa dalam pembangunan misalnya pembukaan jalan baru.

B.2. Potensi Ekonomi

Mengenai potensi ekonomi yang dimiliki desa Bori'Parinding maka, dapat dibagi atas:

a. Sektor Pertanian

Pertanian adalah merupakan suatu sumber penghasilan bagi masyarakat desa yang bercirikan agraris, sehingga sebagian besar pemenuhan kebutuhan sehari-hari bersumber dari hasil pertanian. Dengan meningkatkan hasil pertanian setiap tahun tentunya pendapatan masyarakat semakin baik pula dan sebagai konsekwensinya kebutuhan hidup dari pada keluarganya bisa semakin membaik.

Sehubungan dengan itu maka pemerintah desa Bori' Parinding dengan bekerja sama instansi yang terkait, dalam hal ini Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) mengadakan usaha - usaha pembinaan kepada masyarakat meningkatkan hasil pertanian. Apalagi mengingat areal persawahan yang dimiliki desa ini tidak luas yaitu hanya 253,31 ha, oleh karena itu dianjurkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian sebaik mungkin dengan jalan panenan dua kali setahun. Dimana hal ini diikuti masyarakat dan malah desa ini yang pertama-tama

mengadakan panen dua kali setahun dalam wilayah kecamatan Sesean.

Usaha yang ditempuh untuk meningkatkan produksi pertanian adalah memberikan penyuluhan kepada petani dengan memperkenalkan sistim intensifikasi pertanian sebagai pelaksanaan dari pada Panca Usaha Tani dimana disebutkan bahwa:

"Panca usaha tani di bidang pertanian yaitu penggunaan pupuk kimia, penggunaan bibit unggul dan perbaikan sistim irigasi, pencegahan dan pemberantasan hama dan perbaikan cara bercocok tanam". 19)

Dalam hubungan ini untuk pelaksanaan dari pada Panca Usaha Tani, maka telah lama dirintis oleh pemerintah desa dengan melalui kerjasama dengan instansi yang terkait dalam hal ini Petugas Penyuluh Lapangan dari Dinas Pertanian yang langsung memberikan petunjuk kepada para petani tentang cara penerapan sistim intensifikasi pertanian dengan jalan mengadakan demonstrasi/peragaan, lisan (mengadakan rapat dan kunjungan ke sawah) dan secara tertulis melalui pemberian brosur dan gambar-gambar mengenai sistim pertanian tersebut. Dimana dengan diterimanya secara baik oleh para petani tentang cara penyuluhan yang diberikan oleh pihak PPL sehingga produksi pertanian mereka berhasil meningkatkan guna memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Untuk membuktikan bahwa manfaat penyuluhan tentang sistim intensifikasi pertanian yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan kepada para petani ada dampak baiknya, maka dapat dilihat dari hasil pertanian mereka apakah mengalami peningkatan atau bagaimana. Oleh karena itu hasil pertanian pada desa ini dapat dilihat berdasar perkembangannya

ilai dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1989, seperti da-
am tabel berikut ini:

TABEL 10

KEADAAN PRODUKSI PERTANIAN DI DESA BORI' PARINDING
KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA
TORAJA; DILIHAT DARI TAHUN 1985 - 1989

TAHUN	LUAS TA- NAH (Ha)	PRODUKSI / TON		KETERANGAN
		PREKWENSI	PROSENTASE	
1985	204,67	1.127,48	8,33	Tahun Dasar
1986	242,25	2.760,96	20,55	Meningkat
1987	242,89	1.987,65	14,79	Menurun
1988	245,36	3.426,55	25,50	Meningkat
1989	246,12	4.130,42	30,74	Meningkat
JUMLAH	1.181,29	13.433,06	99,91	-

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Pebruari 1990

Berdasarkan tabel di atas, maka nampak bahwa kenaikan produksi pertanian di desa ini cukup baik. Sebab mulai tahun 1986 mengalami kenaikan sebanyak 2.760,96 ton. Tetapi pada tahun 1987 mengalami penurunan karena disebabkan pengaruh ha-
ma wereng dan juga iklim yang kurang menguntungkan sehingga hasil yang dicapai pada tahun itu hanya 1.987,65 ton.

Kenaikan produksi pertanian berhasil diperbaiki dengan adanya kenaikan pada tahun 1988 yaitu sebanyak 3.426,55. De-
mikian pula halnya pada tahun berikutnya yaitu tahun 1989 mengalami kenaikan sebanyak 4.130,42.

Keberhasilan yang dicapai desa ini dalam meningkatkan produksi pertanian tak lain karena telah dilaksanakannya insentififikasi pertanian oleh para petani dengan tetap memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan. Dan sebagai konsekwensi dari pada adanya kenaikan hasil pertanian, maka penduduk desa ini pada umumnya sudah memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan mereka.

3. Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan yang ada di desa ini adalah kopi, cengkeh dan coklat. Untuk mengetahui berapa banyaknya pohon tanaman tersebut yang dipelihara oleh penduduk dari setiap dusun yang ada dalam wilayah desa tersebut, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 11

JUMLAH TANAMAN PERKEBUNAN DI DESA BORI'PARINDING
KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANA TORAJA, TAHUN 1990

NO	NAMA DUSUN	JENIS TANAMAN			JUMLAH
		KOPI	CENGKEH	COKLAT	
1	Bori' Tanga	822	709	599	2.130
2.	Bori' Lombongan	768	1.369	833	2.970
3.	B.R. Matallo	365	216	250	831
4.	B.R. Matampu'	455	198	376	1.029
5.	Buntu La'bi	470	467	329	1.266
6.	Deri	202	158	195	555
7.	P. Matallo	1.448	243	697	2.388
8.	P. Matampu'	1.162	1.215	604	2.981
J U M L A H		5.692	4.575	3.883	14.150

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Februari 1990

Di dalam tabel di atas dapat dilihat mengenai jumlah ke-
eluruhan ketiga jenis tanaman perkebunan yaitu kopi, cengkeh
dan coklat yang dipelihara oleh penduduk dari setiap dusun
yang ada dalam wilayah desa Bori' Parinding. Seperti di du-
sun Bori' Tanga jumlah pohon yang dipelihara penduduknya ada-
lah 2130 pohon. Untuk dusun Bori' Lombongan maka banyaknya po-
hon yang dipelihara penduduknya yaitu 2970 pohon. Dan kalau
dari dusun Bori' Ranteletok Matallo tentang banyaknya pohon
yang dipelihara penduduknya adalah sebanyak 831 pohon.

Jumlah pohon dari ketiga jenis tanaman tersebut yang di-
pelihara oleh penduduk dusun Bori' Ranteletok Matampu yaitu
1029 pohon. Dari dusun Buntu Ia'bi tentang banyaknya pohon
yang dipelihara penduduknya adalah 1.266 pohon. Untuk dusun
Deri maka banyaknya pohon yang dipelihara oleh penduduknya
adalah 555 pohon. Dan kalau dari dusun Parinding Matallo
mengenai banyaknya pohon yang dipelihara penduduknya adalah
sebanyak 2.338 pohon. Sedangkan jumlah pohon yang dipelihara
oleh penduduk dusun Parinding Matampu' adalah 2.981 pohon.

Disamping itu di desa Bori' Parinding banyak pohon enaw
yang kebanyakan tumbuh dengan sendiri dan ada juga yang di-
tanam oleh penduduk yang jumlahnya tidak banyak. Dimana po-
hon enaw ini sudah banyak penduduk yang mengolahnya dengan
jalam mengambil miranya untuk dibuat minuman ballo'. Mungkin
bagi daerah-daerah lain dilarang membikin minuman ballo' un-
tuk diminum, tetapi bagi daerah Tana Toraja tidak ada lara-
ngan untuk membikin ballo' bagi penduduk, karena boleh dika-
takan adalah merupakan minuman ciri khas daerah ini.

Pada setiap kegiatan yang banyak membutuhkan tenaga manusia misalnya membajak sawah, membangun rumah dan lain-lain jelas ada minuman ballo'. Apalagi kalau dikatakan ada pesta baik pesta rambu tuka' (pesta perkawinan, pesta pengucapan syukur) maupun pesta rambu solo' (pesta kematian) maka bisa ratusan liter minuman ballo' habis dikonsumsi. Karena banyaknya masyarakat suka minum ballo' serta memegang peranan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga akibatnya harga ballo' ada kalanya mahal. Dimana minuman ballo' yang biasa dijual dengan cara memasukkan ke dalam pohon bambu dengan ruasnya dua (bagi orang Tator disebut balo-balo) yang kalau ditakar dengan liter kira-kira 3 atau 4 liter, yang harganya dapat mencapai Rp 2.000,-/ balo kalau musimnya ada pesta, sedangkan pada hari-hari biasa harganya berkisar Rp 500,- sampai dengan Rp 1.000,-/ balo.

Melihat keadaan harga minuman ballo' tersebut, maka tentunya sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang mengelolanya. Untuk itu bagi desa Bori' Parinding yang memiliki ratusan pohon enau, masyarakatnya sudah banyak yang memanfaatkan potensi alam tersebut. Sebab menurut pembuat minuman ballo' sekaligus sebagai penjual yang sempat penulis wawancarai bahwa mengelola pohon enau di desa ini adalah merupakan mata pencaharian ke dua setelah bertani.

Menurut mereka, umur dari pada pohon enau yang dapat dikelola adalah sekitar 10 tahun ke atas dan kalau satu pohon enau yang hanya satu tangkai buahnya dimanfaatkan untuk diambil niranya bisa menghasilkan 15 liter ballo' sehari. Jadi kalau ada yang mengolahnya dua tangkai pada satu pohon enau

itu berarti dapat menghasilkan 30 liter ballo' sehari. Apalagi kalau ada yang mampu mengolah dua atau tiga pohon enau dalam sehari bisa dibayangkan betapa besar keuntungan yang mereka dapatkan. Sedangkan mengenai lamanya tangkai pohon enau yang diambil niranya bisa bertahan paling rendah 6 bulan dan paling tinggi 11 bulan. Dan katanya biasa mereka menjual minuman ballo' 30 liter sampai dengan 35 liter dalam sehari.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari pohon enau adalah bulunya untuk dijadikan atap, terutama pada rumah yang masih memakai atap dari bambu. Juga bulunya dipakai untuk membikin sapu dan tali. Disamping itu kalau ada pesta, daunnya diambil untuk dijadikan atap. Sedangkan batangnya kalau sudah tua dapat dijadikan patok penahan pematang sawah. Dan katanya 1 pohon enau yang besar bisa menghasilkan 30 buah patok, yang kalau dijual harganya satu patok adalah Rp 750,-.

b. Sektor Peternakan

Dalam sektor peternakan, penduduk desa ini memelihara binatang ternak antara lain: kerbau, babi dan ayam. Tetapi dari ke tiga jenis binatang piaraan tersebut, yang kebanyakan dipelihara penduduk adalah beternak babi untuk dijual atau terutama sekali untuk dibawa ke pesta orang mati dan pesta-pesta pengucapan syukur. Demikian pula halnya kerbau yang dipelihara oleh penduduk walaupun jumlahnya tidak sebanyak dengan jumlah babi, dimana penduduk memfungsikan tenaga kerbau untuk membantu mengolah tanah pertanian dan yang terutama dibawa ke pesta orang mati untuk dipotong. Sedangkan ayam yang dipelihara penduduk adalah semata-mata untuk memenuhi

mereka dan ada juga yang dipotong kalau ada pesta pengucapan syukur.

Karena pemerintah melihat bahwa beternak babi di desa ini cukup potensial dikembangkan apalagi didukung dengan adanya tanah yang cocok dimanfaatkan penduduk untuk ditanami sayur babi sebagai bahan makanan dari pada babi, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja, dalam hal ini Dinas Peternakan pada akhir bulan Januari 1990 melaksanakan pengwilayahan komoditas yaitu penyebaran anak babi sebanyak 150 ekor babi betina dan 10 ekor babi jantan untuk diberikan kepada penduduk agar dikembangkan. Dan untuk mengontrol peternakan babi di desa tersebut, maka pemerintah telah membangun Balai Pengobatan bersama rumah Mamtri hewam.

Mengenai sistim pengembaliannya nanti yaitu kalau babi tersebut pertama kalinya melahirkan maka yang diserahkan kepada pemerintah adalah dua ekor dari jumlah anak babi yang lahir. Kemudian selanjutnya kalau melahirkan kedua kalinya maka yang diserahkan kepada pemerintah hanya satu ekor dari jumlah anak babi yang lahir. Dan setelah itu kalau babi tersebut melahirkan lagi maka semua anak babi yang lahir menjadi milik penduduk yang memeliharanya.

Perdagangan yang dilakukan penduduk di sektor ini adalah jual beli kerbau dan babi yang dibawa ke pusat kota Rantepao dan pasar Bolu. Hal ini terjadi bagi penduduk karena berkaitan erat dengan kebudayaan yang berlaku di daerah Tana Toraja, sebab pada setiap ada pesta orang mati yakni upacara pemotongan kerbau dan babi yang ada kalanya ratusan

ekor habis dipotong. Demikian pula pada upacara pesta-pesta pengucapan syukur, di situ yang banyak dipotong adalah babi yang jumlahnya dipotong ada kalanya puluhan ekor dan malah ada yang mencapai ratusan ekor babi. Disamping itu mereka menjual kerbau dan babi untuk menutupi keperluan hidup mereka serta biaya sekolah bagi anak mereka.

Untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan jumlah hewan yang dipelihara oleh penduduk dari setiap dusun yang berada dalam desa Bori' Parinding, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 12

JUMLAH HEWAN TERNAK DI DESA BORI' PARINDING
KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANA TORAJA, TAHUN 1990

NO	NAMA DUSUN	JENIS HEWAN			JUMLAH
		KERBAU	BABI	AYAM	
1	Bori' Tanga	24	350	520	894
2	Bori' Lombongan	21	316	489	826
3	Bori' Rantele - tok Matallo	29	285	432	746
4	Bori' Rantele - tok Matampu'	20	263	467	750
5	Buntu La'bi	17	275	418	710
6	Deri	19	296	387	702
7	Parinding Matal- lo	25	289	407	721
8	Parinding Matam- pu'	22	299	398	719
J U M L A H		177	2.373	3.518	6.068

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Februari 1990

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah hewan yang dipelihara dari tiap-tiap dusun tidaklah jauh berbeda. Sehingga dengan adanya hal ini, maka itu berarti hewan-hewan yang dipelihara pada setiap dusun menunjukkan adanya pemerataan

c. Sektor Pertambangan, Bahan Galian dan Kerajinan Tangan.

Sesuai dengan data yang penulis peroleh, bahwa di sektor ini ada dua sektor yang dapat menunjang perekonomian desa tersebut dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa Bori' Parinding yaitu jenis usaha pengumpulan batu gunung dan pembuatan beberapa jenis kerajinan tangan.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang yang bekerja pada pembuatan kerajinan tangan, yang meliputi antara lain:

- Pembuatan bakul yang rata-rata dikerjakan oleh laki-laki dewasa, dapat membikin 1 bakul besar dalam sehari sedangkan bakul kecil bisa diselesaikan 3 buah bakul dalam sehari. Mengenai harganya, kalau harga 1 bakul besar harganya bisa Rp 3.500,- sedangkan harga 1 bakul kecil adalah Rp 1.000,- .
- Pembuatan nyiru dan keranjang yang mengerjakannya adalah rata-rata wanita dan anak sekolah. Mereka dapat membuat 2 buah nyiru dalam sehari, sedangkan keranjang dapat dibiikin 3 buah keranjang dalam sehari. Mengenai harga dari pada 1 buah nyiru adalah Rp 1.500,- sedangkan harga dari pada 1 buah keranjang yaitu Rp 1.250,-.

Mengenai penduduk yang bekerja dalam pengumpulan batu gunung, katanya mereka dapat mengumpulkan 3 atau 4 kubik ba-

tu gunung . Dan kalau mengenai harga 1 kubik batu gunung biasanya dijual dengan harga Rp 2.500,-

B.3. Potensi Perhubungan

Mengenai perhubungan desa adalah merupakan faktor yang sangat penting, sebab dengan adanya perbaikan dan pembukaan prasarana perhubungan akan merubah arus kelancaran lalu lintas baik dalam rangka distribusi hasil-hasil produksi maupun kelancaran ekonomi secara umum dan jasa. Prasarana perhubungan di desa Bori' Parinding masih sederhana dan perlu untuk diadakan peningkatan terutama jalan-jalan tertentu yang dapat menghubungkan antara dusun dengan dusun serta desa lainnya. Dengan keadaan demikianlah, maka pemerintah bersama masyarakat menaruh perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengadakan perbaikan jalan yang sudah ada serta pembukaan jalan -jalan baru sehingga dusun selama ini yang masih sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor akan dapat ditembus serta bisa menjadikan dusun tersebut lebih produktif dan berusaha untuk mengejar ketinggalannya jika dibandingkan dengan dusun lainnya.

Mengingat betapa pentingnya prasarana perhubungan khususnya yang berkenaan dengan adanya jalan kendaraan bermotor, maka selama ini pemerintah dan masyarakat telah giat melaksanakan pembangunan prasarana perhubungan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat-manfaat yang langsung dirasakan :

- a. Memperlancar hubungan lalu lintas antara desa maupun antara desa dengan kota, terutama kota Rantepao sebagai pusat perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
- b. Memperlancar pengangkutan barang-barang hasil produksi

rakyat utamanya bahan kebutuhan sehari-hari.

- c. Mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dimana tadinya usaha ke arah itu masih sulit dilaksanakan karena faktor prasarana perhubungan yang belum baik.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka pemerintah telah berusaha merehabilitasi jalan-jalan maupun jembatan. Apalagi faktor komunikasi ini dalam pengertian sebagai prasarana perhubungan adalah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan bidang lain.

Dari keseluruhan prasarana perhubungan yang ada, berdasarkan data di kantor desa Bori' Parinding maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Jalan daerah yang telah diaspal adalah 7 km, sedangkan yang masih berbatu-batu/ kerikil adalah 9 km.
- b. Jalan desa yang sudah diberikan batu/ kerikil yaitu 4 km, sedangkan jalan yang masih dalam keadaan tanah adalah 21 km.

B.4. Potensi Pariwisata

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan wisata utama yang semakin penting kedudukannya di samping Bali adalah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, di mana daerah Tana Toraja dijadikan primadonanya pariwisata daerah Sulawesi Selatan berhubung daerah ini mempunyai budaya yang unik, alam yang indah dipandang mata dan udaranya yang sejuk. Daerah Tana Toraja yang kaya dengan berbagai obyek wisata yang sangat menarik sehingga mengakibatkan banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing datang berkunjung untuk melihat

obyek-obyek wisata yang dimiliki daerah ini. Dimana dengan adanya kunjungan para wisatawan, maka akan membawa devisa yang tidak sedikit jumlahnya guna dipakai sebagai penunjang dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah ini.

Potensi pariwisata yang ada di daerah ini masih banyak yang belum dikelola atau dimanfaatkan oleh pemerintah sebagaimana mestinya, pada hal kalau seandainya potensi pariwisata tersebut diperbaiki atau dikembangkan, tentunya akan lebih banyak mendapat kunjungan dari para wisatawan. Karena salah satu faktor penyebabnya sehingga masih banyak obyek wisata tidak terlalu banyak dikunjungi para wisatawan adalah terutama karena faktor prasarana perhubungan ke lokasi obyek wisata yang belum memadai. Sehingga walaupun para wisatawan mengetahui adanya obyek wisata pada suatu desa kalau tidak didukung dengan pengadaan jalan yang cukup baik, mereka biasanya enggan datang berkunjung sebab mereka memperhitungkan kondisi jalan yang merepotkan.

Untuk itu obyek wisata yang masih kurang mendapat kunjungan dari para wisatawan perlu dikembangkan dan diperkenalkan kepada umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan bahwa:

"Kita perlu terus membina kebudayaan nasional atas dasar atau norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang tepat, mencerminkan kepribadian bangsa dan peningkatan nilai yang luhur, namun dalam pada itu perlu ditiadakan dan dicegah nilai-nilai sosial yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit. Kita harus tetap memelihara dan membina tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan Nasional untuk memupuk dan memperkaya serta memberi corak dan Kebudayaan Nasional". 20)

Potensi pariwisata yang ada di wilayah desa Bori' Parinding adalah obyek wisata Kalimbuang dan obyek wisata Lombok serta didukung dengan alamnya yang indah dipandang mata. Dan dari kedua obyek wisata tersebut yang sudah dikelola dengan baik melalui pengadaan jalan aspal dan pelayanan administrasi, sehingga banyak mendapat kunjungan dari para wisatawan yaitu obyek wisata Kalimbuang. Dimana pada obyek ini terdapat Simbuang batu yang merupakan monumen dari salah seorang almarhum yang berkuasa atau pemimpin pada waktu itu, disamping itu ada juga kuburan batu dan perumahan adat.

Sedangkan mengenai obyek wisata Lombok belum dikelola atau dimanfaatkan dengan baik, akibatnya masih sedikit wisatawan yang datang mengunjunginya berhubung jalan ke lokasi belum baik. Padahal pada obyek ini cukup potensial untuk dikembangkan sebab di lokasi ini dilihat tulang-tulang manusia dalam jumlah yang banyak yang disimpan dalam beberapa peti mayat berukuran besar (bagi orang Tator disebut erong), disamping itu pemandangan alamnya yang menarik disekitar obyek tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Usaha Peningkatan Potensi Desa di Desa Bori' Parinding

Dari hasil penelitian yang penulis temukan di lokasi tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam usaha meningkatkan potensi yang dimiliki Desa Bori' Parinding ada beberapa hal yang ikut menentukan dari semua sektor, namun pada dasarnya menurut penulis ada yang lebih menonjol dalam pencapaian tujuan pembangunan yang merupakan atau berkaitan dengan apa yang akan penulis bahas berikut ini.

Kalau dibandingkan dengan Desa atau Kelurahan lainnya di Indonesia, maka Desa Bori' Parinding tidaklah jauh berbeda dalam kemajuan-kemajuan yang dalam melaksanakan pembangunan. Ada pun yang dianggap paling dominan berpengaruh dan sekaligus mendukung peningkatan potensi desa tersebut adalah:

1. Faktor kepemimpinan.
2. Faktor kelembagaan.
3. Faktor sumber daya
4. Faktor teknologi

Dengan asumsi dan kenyataan yang penulis dapatkan, maka penulis berusaha menguraikan tentang masing - masing faktor pendukung di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan responden yang dianggap lebih mengetahui tentang permasalahan yang penulis akan bahas yaitu:

A.1. Faktor Kepemimpinan.

Hakekat dari pada pembangunan ialah rangkaian upaya perkembangan dan perubahan yang dilangsungkan secara sadar, sengaja dan berencana serta bertujuan menuju pada modernitas yang diinginkan itu sifatnya multi dimensional dan bentuknya ialah pluriform atau banyak bentuk, yang mana kesemuanya ini ditujukan kepada usaha membina bangsa atau nation building ditengah kemajuan saman.

Dalam situasi dan kondisi sedemikian itu diperlukan peranan Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan dalam rangka perbaikan desa, khususnya Desa Bori' Parinding, maka telah diusahakan dengan jalan memanfaatkan potensi yang ada sebaik mungkin agar pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan di desa ini, maka kemampuan dan kreativitas Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat memainkan peranan guna keberhasilan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Mengenai faktor yang mempengaruhi suksesnya pembangunan maka ada dua faktor yang dapat mempengaruhi tentang tanggung jawab untuk pelaksanaan berbagai pembangunan di desa tersebut, dimana faktor pertama terletak di atas pundak Kepala Desa bersama aparatnya sebab mereka adalah suatu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa ini. Sedangkan berbicara mengenai faktor yang kedua adalah Kepala Desa yang mempunyai kedudukan kuat sebagai wakil dari pemerintah tingkat atas untuk mengendalikan roda pemerintahan di

desa. Karena posisinya sehingga Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di daerah pedesaan, maka tentunya tidak boleh menyimpang dari aturan yang ditentukan dari atas serta tetap memperhatikan keperluan masyarakat .

Berangkat dari apa yang diuraikan di atas bila penulis hubungkan dengan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa tanggapan masyarakat atau Tokoh masyarakat di Desa Bori' Parinding tentang kepemimpinan pemerintahnya di desa ini yaitu Ibu Hermina Pasolang yang mengatakan bahwa :

a. Oleh Bapak A. Sampewai (eks Kepala Desa di desa ini) mengatakan bahwa : Kepala Desa Bori' Parinding sekarang ini (Ibu Hermina Pasolang) adalah seorang pemimpin yang ideal karena dapat beradaptasi langsung kepada masyarakatnya, bahkan lebih menonjol lagi ialah dengan menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bori' Parinding menurut responden ini adalah:

- Pendekatan Kelembagaan

Dengan melalui pendekatan ini Kepala Desa berupaya mendayagunakan lembaga yang ada untuk berpartisipasi dalam pembangunan seperti :

1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
2. Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat spesifik seperti Rukun Kampung dan Rukun Tetangga.
3. Organisasi Kaum Ibu (PKK), Karang Taruna dan semacamnya.
4. Lembaga-lembaga Tradisional yang ada dalam masyarakat misalnya Saroan dan Aluk Todolo.

5. Lembaga Pendidikan, Lembaga Kesehatan dan Lembaga Keagamaan.

- Pendekatan Keagamaan

Tidak dapat disangkal bahwa agama merupakan faktor ekologis yang secara dominan mempengaruhi sikap dasar masyarakat bahkan telah memberikan warna dan bentuk susunan hidup didalam struktur dan kultur masyarakat kita.

Dengan demikian Kepala Desa yang kebetulan beragama yang sama dianut oleh masyarakatnya, dimana dalam upacara keagamaan atau kegiatan gerejani Kepala Desa sering berperan aktif sehingga masyarakat pun menyambut baik akan sikap tersebut. Gereja yang dipakai sesuai dengan maksud utamanya yaitu tempat beribadah, tempat mengadakan kegiatan keagamaan serta upacara-upacara keagamaan, juga dipakai Kepala Desa bersama aparatnya sebagai wadah dan media komunikasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat.

Gereja sebagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Selain itu gereja juga berfungsi sebagai wadah pembinaan mental masyarakat dalam menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

- Pendekatan Kepribadian

Harus disadari bahwa konsep kerja yang efisien tidak secara merata menjamin keberhasilannya dalam melaksanakan semua program pembangunan, apabila tidak didukung oleh serangkaian kemampuan pribadi dari yang melaksanakan konsep kerja tersebut.

Masyarakat mengakui bahwa dalam pengembangan pembangunan selama beberapa tahun yang lalu sering mengalami keterlambatan karena unsur kepemimpinan yang kurang mampu menggerakkan sumber daya yang ada dalam desa Bori'Parinding. Tetapi kenyataannya setelah diangkatnya Ibu Hermina Pasolang sebagai Kepala Desa enam (6) tahun yang silam, maka sudah banyak wajah Desa ini berubah, oleh karena adanya sikap Kepala Desa yang tanggap dalam memikirkan masa depan Desa yang dipimpinnya.

b. Dari segi lain oleh Bapak S. Tanga (Tokoh Masyarakat dari Dusun Bori' Lombongan) mengatakan bahwa: Kepala Desa adalah salah seorang yang simpatik, oleh karena sifat atau karakternya yang luwes serta ramah, sehingga memberikan kesan tersendiri bagi masyarakatnya bahkan bagi setiap tamu yang datang di wilayahnya. Sehingga tidaklah berlebihan bila penulis mengatakan bahwa Kepala Desa atau pemimpin seperti ini adalah merupakan dambaan semua masyarakat.

c. M.R. Mangesa' (Kepala Dusun Bori' Tanga) mengatakan bahwa: Kepala Desa yang sekarang ini dalam membuat suatu perencanaan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk mengajukan apa yang sangat mendesak di wilayahnya yang secepatnya harus dibenahi.

Sehingga dengan adanya cara ini, maka setiap Kepala Dusun merasa bangga karena dapat menuangkan idenya dan bukan atas kemauan dari Kepala Desa itu sendiri. Dan semua rencana baru dapat dilakukan bila sudah menjadi Keputusan Desa.

d. Sedangkan menurut Bapak Y.R. Tangalayuk (Kepala Dusun Parinding Matallo), mengatakan bahwa: Kepala Desa (Hermina Pasolang) memiliki strategi memerintah. Alasan beliau karena di dalam desa ini beberapa waktu yang lalu sering kali terjadi pembangkangan dari beberapa Tokoh masyarakat karena merasa tidak puas atau merasa tidak diperhatikan sehingga setiap kegiatan yang sudah merupakan Keputusan Desa disabotase.

Namun setelah masuknya Kepala Desa yang sekarang ini lain dari yang biasanya karena dari orang yang sering membangkang tadi, diberikan mandat untuk melaksanakan program desa yang selama ini merupakan keinginannya. Dengan melalui cara ini maka dapat membawa ketenangan dan tipis kemungkinan untuk melakukan akan hal yang selama ini dilaksanakan.

e. Dari pendapat lain yaitu Ibu Dina Bontong (Sekretaris Desa), mengatakan bahwa: Ibu Hermina Pasolang selama dalam melaksanakan tugasnya di desa ini tidak terlepas dari peraturan yang mengikat dari atas dan juga tidak lepas pula dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat beliau lakukan dengan maksud lebih memperlancar kegiatan di desa ini.

Seperti halnya pembuatan jalan-jalan baru pada beberapa dusun telah menggunakan teknologi maju seperti dozer, dimana semua ini merupakan satu kebijaksanaan yang berani tetapi masyarakat tidaklah mengeluh bahkan masyarakat sendiri merasa puas dengan adanya pembukaan jalan-jalan baru karena mereka telah mengetahui betapa pentingnya prasarana jalan dalam memperlancar arus barang dan jasa. Sehingga beban biaya yang tidak

sedikit jumlahnya yaitu sebanyak Rp 52.695.000,- hanya prasarana jalan saja, sedangkan jembatan sebanyak Rp 7.250.000, - dari keduanya ini ditanggung oleh mereka sebagai swadaya murni masyarakat. Dimana semua biaya yang ditanggung oleh masyarakat, oleh Kepala Desa mengambil kebijaksanaan dengan jalan membagi biaya tersebut kepada masing-masing dusun yang ada dalam wilayah kerjanya.

A.2. Faktor Kelembagaan.

Dari beberapa lembaga yang ada di Desa Bori' Parinding baik Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah semuanya itu satu sama lain saling menunjang jika hal ini dilihat dari peranannya dalam usaha meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa ini.

Satu hal yang dapat dikaji lebih jauh lagi adalah peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peran yang sangat berarti dalam pembangunan di Desa Bori' Parinding. Secara langsung dapat dilihat dari keterlibatan anggotanya dalam setiap program kerja yang telah disepakati bersama. Dan secara tidak langsung lembaga ini adalah merupakan wadah dari tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh yang dapat menjadi saluran informasi kepada masyarakat dalam hal inovasi bahkan juga memberikan saran kepada pemerintah tingkat Desa dalam membuat suatu program kerja.

Aktifnya beberapa lembaga yang ada dalam desa ini di dalam pembangunan dapat memberikan kepercayaan dan motivasi kepada masyarakat dan memberikan rasa percaya diri serta ber-

tanggung jawab terhadap kelangsungan pembangunan desanya . Untuk itu kerja sama antara anggota dalam setiap lembaga-lembaga ini hendaknya dipelihara dengan baik berdasarkan atas asas masyawarah, mufakat dan prinsip kekeluargaan . Karena berdasarkan asas dan prinsip ini akan mengakibatkan adanya toleransi dan saling tolong menolong antara anggotanya dan kerja sama yang baik dengan semua masyarakat yang ada di desa ini . Dan juga dengan adanya asas serta prinsip yang dimiliki oleh setiap anggota, maka dapatlah dikatakan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dan kerengangan di dalam tubuh lembaga tersebut.

Adapun lembaga-lembaga atau organisasi yang memperlihatkan keaktifannya dalam pembangunan di desa ini adalah:

a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa LKMD adalah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan timbul dari keinsyafan atau kesadaran masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi harapan bersama, maka perlu adanya organisasi yang teratur guna menunjang keberhasilan dalam melaksanakan usaha bersama. Sebab dengan adanya lembaga ini sangat penting artinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat terutama masyarakat desa dalam usaha mengejar keterbelakangan dalam pembangunan.

Oleh karena itu Pemerintah Desa hendaknya mampu menggunakan LKMD sebagai sarana dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan jalan menumbuhkan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat yang merupakan modal besar didalam membiayai kegiatan pemba-

ngunan di desa. Untuk itu pemerintah desa harus bekerja sama secara baik dengan setiap tokoh-tokoh masyarakat yang duduk dalam lembaga ini guna membicarakan kebutuhan masyarakatnya.

Seperti diketahui bahwa status dari pada Lembaga Ketahanan Masyarakat adalah sebagai Lembaga Non Pemerintah, karena lembaga ini tumbuh atas kesadaran dan tanggung jawab sosial dari masyarakat desa dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga desa dengan jalan menggali serta menggerakkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, maka dalam hal ini LKMD berfungsi membantu pemerintah desa dalam usaha melaksanakan pembangunan desa. Sedangkan mengenai sifat dari pada LKMD adalah bersifat lokal yang berarti semua LKMD mempunyai tingkat yang sama dan tidak mempunyai pusat cabang atau ranting serta tidak bernaung dibawah salah satu partai politik. Untuk itu LKMD adalah merupakan wadah bagi semua organisasi atau instansi untuk membantu masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian maka LKMD merupakan sarana pemerintah dalam mengajak masyarakat terutama masyarakat desa untuk berpartisipasi didalam pembangunan.

Mengenai kegiatan yang dilakukan oleh LKMD dalam rangka mendapatkan dana pembangunan yang dipungut dari masyarakat di desa ini telah mengalami kemajuan. Terbukti dimana masyarakat sudah memiliki rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat di desa ini dapat berupa uang, pikiran, bahan bangunan maupun tenaga. Dan kalau ada pesta-pesta baik pesta rambu tuka' (pesta pengucapan syukur, pesta orang kawin) maupun pesta rambu solo' (pesta orang mati) telah ditetapkan bahwa kalau pada seti-

ap babi yang dipotong, maka dikeluarkan 1 kaki belakang, sedangkan kalau pada setiap ada kerbau dipotong maka yang dikeluarkan adalah 1 kaki belakangnya untuk dana LKMD. Dan biasanya bahagian LKMD diuangkan dengan jalan dilelang pada setiap pesta, juga ada kalanya daging yang diserahkan kepada LKMD ditukar dengan kerbau dan babi yang masih hidup dengan ketentuan tidak jauh beda dengan harga daging tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran tentang banyaknya sumbangan hewan atau daging yang diberikan penduduk kepada LKMD untuk dipakai sebagai dana dalam melaksanakan pembangunan di desa ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 13

SUMBANGAN HEWAN / DAGING OLEH PENDUDUK DI DESA BORI'
PARINDING KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II TANA TORAJA, DILIHAT DARI TAHUN 1986 - 1989

NO	NAMA DUSUN	T A H U N			
		1986 (Rp)	1987 (Rp)	1988 (Rp)	1989 (Rp)
1.	Bori' Tanga	395.000	642.000	1.150.000	730.000
2.	Bori' Lombongan	523.000	415.000	697.000	1.132.000
3.	B.R. Matallo	376.000	640.000	578.000	825.000
4.	B.R. Matampu'	497.800	577.000	751.000	638.500
5.	Buntu La'bi	410.000	565.000	397.000	647.000
6.	Deri	314.000	603.000	583.000	479.000
7.	P. Matallo	482.000	358.000	605.700	897.000
8.	P. Matampu'	396.000	576.400	925.000	710.000
J U M L A H		3.393.000	4.376.400	5.686.700	6.058.500

Sumber: Kantor Desa Bori' Parinding, Februari 1990

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui mengenai banyaknya sumbangan penduduk berupa daging atau hewan yang dihitung dalam uang mulai tahun 1986 - 1989, dari

setiap dusun. Sumbangan tersebut bersumber dari penduduk yang mengadakan pesta baik pesta rambu tuka' (pesta pengucapan syukur, pesta perkawinan) maupun pesta rambu solo' (pesta orang mati). Dimana sumbangan-sumbangan ini dimanfaatkan sebagai dana untuk membiayai berbagai pelaksanaan pembangunan di desa ini, misalnya pembukaan jalan, pembangunan prasarana produksi dan lain-lain.

b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pada uraian terdahulu dikatakan bahwa PKK adalah merupakan suatu gerakan pembangunan melalui keluarga sebagai unit atau kelompok yang terkecil dalam masyarakat, dengan wanita sebagai sasaran untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Sedangkan mengenai tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang menikmati ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir maupun bathin dalam tata kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan tujuan dan peranan PKK dalam pembangunan, maka PKK di desa Bori' Parinding telah mengadakan beberapa kegiatan antara lain:

- Memberikan kursus masak-memasak dan menjahit kepada penduduk dari setiap dusun yang pesertanya sebanyak 175 orang.
- Mengadakan pembinaan kepada masyarakat pada setiap dusun yang memiliki apotik hidup yang jumlahnya sebanyak 718 apotik hidup.
- Memberikan penerangan tentang pentingnya taman gizi dengan jalan memanfaatkan tanah yang kosong di depan rumah dan sekitarnya.

- Mengadakan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila kepada beberapa penduduk dari setiap dusun yang pesertanya adalah sebanyak 986 orang.

Melihat aktivitas PKK di desa ini jika dibandingkan dengan ke 10 program PKK maka jelas masih banyak yang belum dilaksanakan berhubung kurangnya dana serta animo masyarakat khususnya wanita belum begitu tinggi tingkat kesadarannya.

c. Mengenai lembaga-lembaga seperti: lembaga pendidikan, kesehatan dan keagamaan, maka telah diuraikan pada bab terdahulu mengenai peran sertanya dalam memajukan desa ini. Di mana keaktifannya dalam usaha menunjang keberhasilan pembangunan di desa ini, sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu masyarakat pula memberikan dukungannya terhadap lembaga-lembaga ini dengan jalan memberikan sumbangan-sumbangan bilamana ada prasarana dari lembaga tersebut yang hendak dibangun.

A.3. Faktor Sumber Daya.

Secara garis besarnya sumber daya dapat digolongkan dalam dua bahagian besar yaitu:

- Sumber daya manusia
- Sumber daya non manusia atau sumber daya alam.

Dengan adanya pendayagunaan ke dua sumber ini maka itu merupakan suatu upaya untuk mengalokasikan semua daya yang ada untuk ditetapkan dalam kurun waktu tertentu baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat bukan manusia didalam rangka mewujudkan program-program pembangunan.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas maka

pemanfaatan sumber daya yang ada di desa ini adalah merupakan salah satu usaha manusia dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan pedesaan seperti di desa Bori' Parinding. Oleh karena itu dengan melalui pendayagunaan potensi-potensi yang ada maka dapatlah dipastikan akan menunjang keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa ini.

Adapun jenis-jenis sumber daya yang ada di desa Bori' Parinding yaitu:

1. Sumber manusia (human resources)

Sumber manusia yang terdapat di desa ini adalah bersifat pikiran, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan tenaga yang dapat didayagunakan dalam proses pembangunan.. Sebab sumber manusia yang ada di desa ini dalam statusnya sehari-hari berbeda satu sama lainnya yaitu terdiri dari : petani 1.235 orang, kerajinan tangan 50 orang, perdagangan 4 orang, pengangkutan 3 orang, pegawai 95 orang, tukang kayu 47 orang, dukun bayi 15 orang dan pandai besi 2 orang.

Jadi jumlah sumber manusia yang dapat didayagunakan dan dihasilgunakan dalam pembangunan kalau ditinjau dari tingkat mata pencaharian penduduk sebanyak 1.451 orang, sedangkan tenaga kerja dari penduduk yang dianggap produktif adalah yang berusia antara 15-64 tahun sebanyak 2600 orang. Dimana dari jumlah tenaga dari penduduk desa ini yang dianggap produktif, kalau dilihat yang bekerja dengan yang tidak bekerja atau menganggur 'maka yang sudah bekerja lebih banyak jumlahnya.

Hal ini terjadi karena potensi tenaga kerja manusia di desa ini sudah banyak yang dimanfaatkan dalam menggali poten-

si alam yang tersedia, misalnya dengan adanya panen padi dua kali dalam setahun. Sehingga untuk mengolah tanah pertanian tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. Demikian pula halnya pemanfaatan pohon enau untuk dijadikan 'minuman ballo', yang berarti membuka lapangan kerja bagi penduduk di desa ini. Disamping itu ada pula penduduk yang membuat beberapa jenis kerajinan tangan, mengumpulkan batu gunung dan lain-lain, yang kesemuanya ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi dengan melihat aktivitas penduduk di desa ini, maka dapat dikatakan mereka telah berusaha menggalikan dan mengolah potensi-potensi alam yang ada untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus turut memajukan desanya.

Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa ini baik yang dikoordinasikan oleh pemerintah misalnya: pembangunan Balai Pertemuan Masyarakat, pembangunan prasarana jalan dan lain-lain, maupun pembangunan yang dikoordinasikan non pemerintah seperti pembangunan rumah ibadah adalah sangat besar. Dimana dengan adanya perwujudan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dan dana yang merupakan sumber pembiayaan yang sangat penting artinya untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa ini.

2. Sumber bukan manusia

Sumber bukan manusia adalah berbagai sumber diluar manusia yang dapat didayagunakan oleh manusia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dirinya dan masyarakat lainnya melalui proses pembangunan yang dilaksanakan di desa ini. Adapun sumber bukan manusia itu yang dapat digolongkan

atas:

a. Sumber alam (natural resources)

Sumber alam yang dimiliki oleh desa Bori'Parinding adalah berupa: tanah, batu gunung, beberapa jenis hewan (babi, kerbau, ayam dan lain-lain), serta beberapa jenis tumbuh-tumbuhan (pohon enau, langsung, bambu, betung dan lain sebagainya).

b. Sumber sosial budaya (social cultural resources) yang meliputi: adat istiadat, peninggalan sejarah dan semua bentuk organisasi kemasyarakatan.

c. Sumber teknologi yang meliputi: penggilingan padi, sensor, bangunan rumah, generator dan lain-lain.

Kalau dilihat dari klasifikasi pemanfaatannya maka sumber yang potensial sudah dialokasikan, walaupun masih dalam taraf sederhana seperti pemanfaatan pohon enau yang niranya diambil untuk dibikin minuman ballo', pemanfaatan batu gunung yang menjadi salah satu mata pencaharian tambahan bagi penduduk. Dengan melihat mekanisme kerja dan pengalokasian sumber-sumber tersebut di atas oleh pemerintah di desa ini, maka dapat merupakan usaha meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya menunjang keberhasilan pembangunan di desa Bori' Parinding.

A.4. Faktor Teknologi.

Berbicara mengenai teknologi maka itu berarti adalah merupakan pengetahuan untuk menggunakan daya cipta manusia dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Sehubungan dengan itu, maka teknologi kalau diartikan secara implisit adalah

sebagai teknologi pembangunan yang sifat dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan dalam penterapannya maka ada dikenal teknologi tepat guna yang artinya teknologi yang dapat diterima dan digunakan secara menguntungkan, mampu menyerap tenaga kerja serta dapat membantu pertumbuhan ekonomi di desa dan meningkatkan kesejahteraan sosial dari masyarakat. Sehubungan dengan pengertian teknologi ini, yang kemudian dikaitkan dengan kenyataan di desa Bori' Parinding maka mempunyai relevansi, namun dalam teknik penggunaannya serta bobotnya masih sangat sederhana. Tetapi dalam kenyataannya bahwa keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di desa Bori' Parinding juga dipengaruhi oleh adanya penggunaan teknologi. Alih teknologi dan pengembangannya dimaksudkan untuk pencapaian kemajuan pembangunan dan bukannya berarti harus membelakangi unsur-unsur yang masih sifatnya tradisional yang ada di desa ini, tetapi tetap dipadukan dalam pelaksanaannya.

Dari perpaduan teknologi modern dengan teknologi pedesaan yang masih sangat sederhana bukanlah hal yang janggal tetapi malah dapat saling menunjang. Seperti halnya dalam prospek pengembangan sumber daya alam di desa Bori' Parinding tidak berarti bahwa semuanya dapat dikerjakan dengan penggunaan teknologi mutakhir, seperti kerajinan tangan masyarakat tetapi sebaliknya apa yang dianggap berat dan memakan waktu yang cukup lama, itulah yang harus menggunakan teknologi maju seperti pembukaan jalan dengan memakai dozer, penggunaan

mesin penggilingan dan sebagainya. Semuanya ini dimaksudkan untuk menghemat waktu dan tenaga dengan tidak mengesampingkan situasi dan kondisi daerahnya.

Menurut pendapat penulis di dalam rangka usaha penerapan teknologi di desa Bori' Parinding dalam pencapaian pengembangan potensi desanya, maka sangatlah tepat karena masyarakat di desa ini sedikitnya sudah mengenal mengenai efisiensi, sedangkan dilain pihak pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sangatlah banyak.

Dengan adanya penggunaan teknologi maju di desa ini maka jelas membawa dampak yang positif bagi masyarakat, utamanya dalam melihat kenyataan bahwa sudah ada yang mereka bisa sampai ke rumah dengan kendaraan bermotor oleh karena didukung adanya sarana transportasi yang cukup lancar. Sedangkan dibidang produksi yang selama ini masyarakat langsung bekerja dengan paksa dan tidak berfikir efisiensi, maka sekarang ini dapat menikmati hasil produksinya yang semakin meningkat karena sudah banyak memanfaatkan teknologi maju, seperti penggunaan penggilingan padi, penggunaan pupuk, bibit unggul dan pembasmi serangga di sektor pertanian, penggunaan sensor untuk mengolah bahan-bahan bangunan rumah, penggunaan listrik oleh sebahagian penduduk dalam kegiatan tertentu, penggunaan pipa-pipa air minum dan lain sebagainya.

B. Beberapa Hambatan Yang Ditemui Dalam Usaha Peningkatan Potensi Desa di Desa Bori' Parinding

Sebagai pemimpin pemerintahan yang tertinggi di desanya, Kepala Desa Bori' Parinding dalam menjalankan tugas dan tang-

gung jawabnya untuk melaksanakan pembangunan bersama rakyatnya, maka masih banyak menghadapi beberapa hambatan yang harus mendapat perhatian untuk ditanggulangi. Dalam wawancara penulis dengan beberapa responden dan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian diperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa bersama warga desa ini didalam rangka memajukan desanya melalui pembangunan diberbagai sektor, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 14

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DESA BORI'PARINDING KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA, TAHUN 1990

NO	HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	RESPONDEN			
		KEPALA DESA DAN APARATNYA		TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT BIASA	
		JUMLAH	PERSEN	JUMLAH	PERSEN
1	Kurangnya Pengawasan	4	17,39	5	15,62
2	Penggunaan dana yang tidak efisien	6	26,08	9	28,12
3	Transportasi yang kurang lancar	8	34,78	10	31,25
4	Rendahnya tingkat pendidikan	5	21,73	8	25,00
J U M L A H		23	100,00	32	99,99

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Pebruari 1990

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan responden yang diwawancarai adalah sebanyak 55 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok responden pertama sejumlah 23 orang yang terdiri Kepala Desa Bori' Parinding beserta aparatnya berpendapat bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan desa, maka hambatan yang ditemui adalah transportasi yang menghubungkan antara dusun dengan dusun yang lain di dalam wilayah desa Bori' Parinding kurang lancar karena medannya yang berbukit-bukit dan prasarana jalan desa yang belum baik. Sehingga apabila ada bangunan yang hendak dibangun, dimana bahan - bahan bangunan yang akan diangkut dengan kendaraan mengalami kesulitan. Mengenai hambatan ini dikemukakan oleh 8 orang atau 34,78 % .

Sedangkan sebanyak 6 orang atau 26,08 % berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, masih banyak yang dijumpai penggunaan dana pembangunan yang tidak efisien. Sebagai suatu contoh: pada waktu masyarakat desa mengadakan kerja gotong royong untuk pembukaan jalan desa, dimana masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut diberikan konsumsi. Dan biasanya dalam pelaksanaan kerja ini jumlah anggota kelompok kerja yang diperkirakan hadir berkisar 40 orang, pada hal biasanya Ketua kelompok menyediakan konsumsi yang bisa dimakan sampai 65 orang. Dan hal ini sering kali berlangsung terus pada tiap-tiap kerja gotong royong masyarakat. Jadi dengan adanya hal ini maka itu adalah merupakan suatu pemborosan dana pembangunan yang memang sedikit, yang seharusnya

dapat dipakai untuk membiayai proyek pembangunan yang lain.

Dan pendapat lain dari 4 orang atau 17,39 % menyatakan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap pelaksanaan suatu pembangunan, sehingga pembangunan tersebut sering mengalami kemandekan.

Kemudian yang sisanya 5 orang atau 21,73 % berpendapat bahwa masih adanya aparat desa yang tingkat pendidikannya rendah atau malah ada yang tidak pernah menikmati pendidikan di bangku sekolah, sehingga mereka susah mengikuti perkembangan saman yang nantinya sangat berharga bagi dirinya untuk digunakan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

2. Kelompok responden kedua sebanyak 32 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat biasa di desa ini, bahwa hambatan yang dihadapi dalam mensukseskan pelaksanaan program pembangunan desa adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan aparat pemerintah terhadap penyelesaian suatu proyek pembangunan desa. Mengenai masalah ini dikemukakan oleh 5 orang atau 15,62 % . Mereka berpendapat demikian karena didasarkan pada kurang baiknya mutu dari pada pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang tersebar di setiap dusun. Juga penilaian ini mereka dasarkan terhadap karakter dari beberapa pelaksana atau pemborong suatu bangunan di desa ini, dimana kebanyakan lebih memburu keuntungan sehingga akibatnya kurang memperhatikan mutu bangunan, Misalnya pembuatan sumur umum untuk pengadaan air bersih bagi masyarakat desa, baru beberapa bulan dibangun sudah mengalami kerusakan.

Sedangkan pendapat lain sebanyak 9 orang atau sebesar 28,12 % mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di desa ini, masih adanya orang yang diberikan kepercayaan untuk memegang dana pembangunan dikeluarkan bukan pada tempatnya, sehingga hal ini tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Dan dari pendapat lain sebanyak 10 orang atau sebesar 31,25 % mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi adalah prasarana perhubungan yang menghubungkan dusun dengan dusun lainnya di dalam wilayah desa Bori' Parinding yang belum baik. Sehingga masyarakat yang hendak mengangkut barang-barang hasil produksi mereka untuk dipasarkan mengalami kesulitan berhubung kendaraan sangat kurang dan ada kalanya tidak bisa menembus jalan desa yang melintasi dusun tersebut. Demikian pula halnya kalau ada bangunan yang akan didirikan baik yang dibangun oleh masyarakat maupun pemerintah sering kali mengalami hambatan untuk mengangkut bahan-bahan bangunan dengan kendaraan, sehingga tenaga manusia yang dipakai.

Kemudian yang sisanya sebanyak 8 orang atau sebesar 25,00 % berpendapat bahwa masih banyak masyarakat di desa ini yang memiliki tingkat pendidikan rendah, akibatnya mereka sering mengalami kesulitan didalam mengikuti perkembangan pengetahuan diberbagai sektor pembangunan. Pada hal dengan menguasai pengetahuan tersebut, maka akan menimbulkan keterampilan dalam menangani suatu pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

C. Hasil-Hasil Pembangunan Yang Dicapai di Desa Bori' Parinding.

Suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka tentunya tugas dan kewajiban dari masyarakat sangat diharapkan dalam mensukseskan setiap pembangunan yang diinginkan. Dan pemerintah dalam hubungan ini berkewajiban memberikan bimbingan, fasilitas dan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan yang tersedia. Untuk itu pembangunan yang dilaksanakan di desa perlu dikordinasi secara baik sehingga sasarnya benar-benar berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan rakyat. Agar maksud tersebut dapat direalisasikan, maka hendaknya memperhatikan berbagai keadaan dan masalah yang dihadapi dengan melalui usaha-usaha peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan maupun masyarakat secara keseluruhan serta memanfaatkan dana yang diperlukan bagi pembangunan di desa secara efisien.

Dalam melaksanakan pembangunan di desa ini, Kepala Desa melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mengadakan penelitian dan mengidentifikasi semua masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat dimana kemudian diolah melalui musyawarah dan akhirnya menentukan kebutuhan yang paling dibutuhkan masyarakat. Dengan diketahuinya kebutuhan dasar masyarakat maka dibuatlah satu perencanaan pembangunan desa baik program jangka panjang maupun program jangka pendek, melalui rapat atau pertemuan antara pemerintah desa dengan tokoh masyarakat yang duduk sebagai anggota LKMD. Dimana dalam pelaksana-

an pembangunan maka lebih banyak dititikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat yang berbentuk swakarsa dan swadaya gotong royong yang merupakan modal besar di dalam membiayai pembangunan.

Dari hasil pelaksanaan proyek pembangunan yang terdapat di desa Bori' Parinding, menurut data yang penulis dapatkan menunjukkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat sudah baik, sehingga mereka bersatu padu berusaha mensukseskan setiap pembangunan yang dijalankan di desa ini. Dimana dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut, pembiayaannya lebih banyak bersumber dari masyarakat itu sendiri dengan didukung pula oleh bantuan dana dari pemerintah yang jumlahnya tidak banyak. Untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini di Desa Bori' Parinding, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditemukan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa pada hakekatnya dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat, dimana pihak pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swadaya, swakarsa dan gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan.
2. Untuk berhasilnya usaha pembangunan desa yang sekarang ini sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah dengan masyarakat, maka potensi-potensi yang dimiliki desa ini telah mendapat perhatian untuk dikelola. Dimana dengan adanya penggalian dan penggarapan potensi-potensi yang ada di desa tersebut cukup besar memberi andil didalam pelaksanaan pembangunan.
3. Kepala Desa Bori' Parinding mempunyai peranan penting dalam segenap proses kegiatan pembangunan di wilayahnya yang apabila dilaksanakan dengan baik, maka dapat menumbuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa ini. Namun sebelumnya itu sebagai prasyarat, maka terlebih dahulu Kepala Desa dan aparatnya harus mampu menempatkan diri sebagai

pemimpin masyarakat yang disenangi dan ditaati.

4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Bori' Parinding adalah besar. Walaupun tidak semua anggota masyarakat turut serta dalam merencanakan proyek-proyek pembangunan Desa, tetapi dengan hadirnya LKMD dimana tokoh-tokoh masyarakat duduk dalam lembaga ini untuk membantu Kepala Desa dalam membuat perencanaan, maka secara teknis hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat ikut berperan dalam perencanaan pembangunan desa, mengingat LKMD adalah wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

B. Saran - Saran

Di atas telah dikemukakan beberapa simpulan, maka berikut ini akan dikemukakan pula saran-saran dalam rangka usaha peningkatan potensi desa, khususnya bagi desa penelitian. Saran-saran yang dikemukakan diharapkan semoga ada manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di desa ini, maka pemerintah perlu memberikan gambaran dan pandangan yang jelas kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang akan diambil sehingga masyarakat merasa diikutsertakan dalam setiap pembangunan yang hendak dilaksanakan di desanya.
2. Perlunya menginventarisir semua potensi yang ada di desa ini secara terperinci dan sistimatis, untuk dapat memelihara statistik yang baik sehingga dalam setiap perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
3. Dalam mensukseskan program pembangunan dan lebih ekono-

misnya penggunaan dana pembangunan desa, terutama yang berasal dari swadaya murni masyarakat desa, maka alangkah baiknya penggunaan dana untuk konsumsi pada saat mengadakan kerja gotong royong pada suatu pembangunan ditanggung masing-masing oleh individu . Caranya adalah setiap ibu rumah tangga yang suaminya atau anaknya bekerja pada saat itu harus membawa dan menyediakannya dimana dia bekerja untuk dikonsumsi kalau waktu makan.

DAFTAR KUTIPAN

Bab I

1. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, Sekretaris Negara RI. Jakarta. 1989. halaman 101.
2. I. Nyoman Beratha. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. halaman 105.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Aneka Ilmu. Semarang. 1983. halaman 68.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Aneka Ilmu. Semarang. 1983. halaman 5.
5. Ibid, halaman 76.
6. Sondang P. Siagian. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta. 1983. halaman 47.
7. Bahan Penataran dan Referensi Penataran, Op. Cit. halaman 145.

Bab II

8. W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1984. halaman 1136.
9. Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Desa. Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Propensi Dati I Sulawesi Selatan. Ujung Pandang. 1981. halaman 3.
10. Ibid, halaman 37.
11. Ibid, halaman 182.
12. UU No. 5 Tahun 1979, Op. Cit. halaman 6.
13. I. Nyoman Beratha. loc. cit.
14. Nathan Keyfitz dan Widjoyo Nitisastro. Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia. PT Pembangunan. Jakarta. 1964 halaman 35.
15. Ragnar Nurkse. Masalah Pembentukan Modal di Negara-Negara Yang Sedang Berkembang. Bharata. Jakarta. 1963. halaman 53.

Bab III

16. Direktorat Pembangunan Desa Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Masyarakat Desa. Departemen Dalam Negeri. Jakarta. 1980. halaman 12.
17. Ibid, halaman 48.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1960. Departemen Dalam Negeri. Jakarta. 1962. halaman 25.
19. S. Krismadi. Menggerakkan dan Membangun Pertanian . Jasa Agung. Jakarta. 1968. halaman 37.
20. I.B. Mantra. Harian Gema. Ujung Pandang. Tanggal 4 Juli 1974.

Bab IV

21. Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan. Rajawali Jakarta. 1982. halaman 39.
22. Kartini Kartono. loc. cit.
23. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Administrasi LKMD. Direktorat Pembangunan Desa Propensi Sulawesi Selatan. Ujung Pandang. 1981. halaman 13.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU TEKS

- Beratha, I. Nyoman. 1982. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Daljoeni, N. 1982. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Alumni. Jakarta.
- Hagal, Peter. 1985. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Rajawali. Jakarta.
- Hanafi, Abdillah. 1981. Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. Usaha Nasional. Surabaya.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1982. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Gunung Agung. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1984. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1985. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Bina Aksara. Jakarta.
- Pamuji, S. 1985. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Bina Aksara. Jakarta.
- Prasadja, Buddy. 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. Rajawali. Jakarta.
- Siagian, S.P. 1985. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta.
- Soemarno, H. 1985. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Sampurna Karunia. Jakarta.
- Soeparno, R. 1977. Mengenal Desa Gerak dan Pengelolaannya. Intermana. Jakarta.
- Soeryadi, A. 1979. Pembangunan Masyarakat Desa. Alumni. Bandung.
- Surianingrat, Bayu. 1985. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Aksara Baru. Jakarta.
- Thala, H.M. 1986. Pembangunan Masyarakat Desa dan Daerah Pedesaan. Lepas. Ujung Pandang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. Perencanaan Pembangunan.

B. BUKU METODOLOGI PENELITIAN

Ndraha, Taliziduhu. 1982. Metodologi Penelitian Pembangunan Desa. Bina Aksara. Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 1986. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.

Surakhmad, Winarno. 1982. Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik. Tarsito. Bandung.

C. LAIN-LAIN

Abdullah, Syukur. 1987. Bunga Rampai Administrasi Pembangunan : Kumpulan Karangan Tentang Masalah-Masalah Pembangunan, Kepemimpinan dan Peranan Birokrasi dalam Pembangunan Nasional. Ujung Pandang.

A Anonim. 1988. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.